

**ANALISIS KECENDERUNGAN DAN PENYEBAB PRILAKU  
NON VOTING PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
(STUDI DI KECAMATAN SRAGI LAMPUNG SELATAN)**

**(Skripsi)**

**Oleh :  
Rahmando  
NPM 1846021013**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS KECENDERUNGAN DAN PENYEBAB PRILAKU NON VOTING PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 (STUDI DI KECAMATAN SRAGI LAMPUNG SELATAN)**

**Oleh**

**RAHMANDO**

Prilaku Non Voting Adalah sebuah fenomena di dalam Pemilihan Umum yang dimana hak suara menjadi salah satu indikator keberhasilan berjalannya demokrasi di Indonesia khususnya di Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan.

Tujuan dari penelitian ini mendeskripsikan terjadinya Prilaku Non Voting dengan melihat Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Prilaku Non Voting di Kecamatan Sragi. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Faktor – faktor Terjadinya Prilaku Non Voting dalam penelitian ini diukur berdasarkan konsep kinerja menurut Eef Saifulloh Fatah yang terdiri dari 4 indikator yaitu: 1) Faktor Teknis, 2) Faktor Teknis Politis, 3) Faktor Politis, 4) Faktor Ideologis,. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari 4 indikator, Faktor Teknis adalah penyebab utama terjadinya Prilaku Non voting Di Kecamatan Sragi Pada Pemilihan Umum 2024.

Kata Kunci: Prilaku non voting, Faktor – faktor non voting, pemilu

## ***ABSTRACT***

### **ANALYSIS OF TRENDS AND CAUSES OF BEHAVIOR NON VOTING IN THE 2024 GENERAL ELECTION (STUDY IN SRAGI DISTRICT, SOUTH LAMPUNG)**

*By*

**RAHMANDO**

Non-Voting Behavior is a phenomenon in General Elections where voting rights are an indicator of the success of democracy in Indonesia, especially in Sragi District, South Lampung Regency.

The aim of this research is to describe the occurrence of non-voting behavior by looking at the factors that cause non-voting behavior in Sragi District. The research method used is descriptive research with a qualitative approach, with data collection techniques including observation, interviews and documentation.

The factors that occur in non-voting behavior in this research are measured based on the performance concept according to Eef Saifulloh Fatah which consists of 4 indicators, namely: 1) Technical factors, 2) Political technical factors, 3) Political factors, 4) Ideological factors. The results of this research show that of the 4 indicators, technical factors are the main cause of non-voting behavior in Sragi District in the 2024 General Election.

Keywords: Non-voting behavior, non-voting factors, elections

**ANALISIS KECENDERUNGAN DAN PENYABAB PRILAKU  
NON VOTING PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
(STUDI DI KECAMATAN SRAGI LAMPUNG SELATAN)**

**Oleh**

**Rahmando**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar  
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

**Judul Skripsi : ANALISIS KECENDERUNGAN DAN  
PENYABAB PRILAKU NON VOTING PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
(STUDI DI KECAMATAN SRAGI LAMPUNG  
SELATAN)**

**Nama : Rahmanto**

**Nomor Pokok Mahasiswa : 1846021013**

**Program Studi : Ilmu Pemerintahan**

**Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi**



**2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**

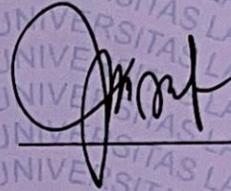
*[Signature]*

**Tabah Maryanah**  
**NIP. 197106042003122001**

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

Ketua : **Darmawan Purba, S.Ip., M.IP**



Penguji : **Drs. R Sigit Krisbintoro, M.IP**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**

**Prof. Dr. Anna Gasfina Zainal, S.Sos., M. SI**  
**NIP. 197608212000032001**



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 03 Februari 2025**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Nama : Rahmando  
NPM : 1846021013  
Jurusan : Ilmu Pemerintahan  
Alamat : Desa Pasuruan Kecamatan Penengahan Kabupaten  
Lampung Selatan  
No. Hp : 081278219002

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“ANALISIS  
KECENDERUNGAN DAN PENYABAB PRILAKU NON VOTING PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**(STUDI DI KECAMATAN SRAGI LAMPUNG SELATAN)**

”. Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiat (milik orang lain)  
ataupun dibuat oleh orang lain.

Apabila dikemudian hari hasil penelitian atau tugas akhir saya ada pihak-oihak  
yang merasa keberatan, maka saya akan bertanggung jawab dengan peraturan  
yang berlaku dan siap untuk dicabut gelar akademik saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dalam  
keadaan tekanan dari pihak manapun.

Bandar Lampung, 20 April 2025

Yang Membuat Pernyataan



**Rahmando**  
NPM. 1846021013

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Rahmando dilahirkan di Kalianda 26 April 2000. Penulis merupakan anak kedua dari 2 saudara dari pasangan bapak Edi Suswandi dan Evi Yanti

Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Darma Wanita pada tahun 2006, SD N 3 Pasuruan pada tahun 2012, SMP Negeri 1 Kalianda pada tahun 2015, SMA Negeri 1 Kalianda pada tahun 2018, pada tahun 2018 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Serta penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2023 selama 40 hari di Desa Lubuk Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan

Selama menempuh perkuliahan penulis aktif berorganisasi di tingkat jurusan. Penulis aktif di Sekretaris biro 3, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Sosial Politik serta melakukan magang di BAPEDDA Provinsi Lampung.

## **MOTTO**

*“Jika kamu berbuat baik maka kebaikan akan menghampiri mu dan jika kamu berbuat buruk maka keburukan akan menimpamu”*

**(Rahmando)**

*“Ketika engkau berharap kepada manusia maka engkau telah berputus asa tetapi ketika engkau berharap kepada Tuhan mu maka akan ada seribu pintu untuk harapan hidupmu”.*

**(Edi Siswandy)**

*“Berbuat lah baik tanpa harus pamrih, sesungguhnya itulah yang akan menolong mu”.*

**(Evi Yanti)**

## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillah 'ala Kulli Hal*, segala puji bagi-Mu yaa Allah yang telah memberikan rahmat, kekuatan, kesabaran, dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini

Shalawat teriring salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Saw. Semoga skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat

Tidak ada lembar yang paling indah dalam skripsi ini kecuali lembar persembahan. Skripsi ini adalah karya tulis yang aku kerjakan agar selangkah lebih dekat dengan mimpi yang Ibu ingin aku wujudkan. Aku membawa mimpi-mimpiku dalam setiap kata yang tertulis dalam skripsi ini, menerbitkan setiap amin yang dilantirkan oleh Ibu dan Ayah di tiap sepertiga malam

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada:

Kedua Orang Tuaku

**Edi Siswandy & Evi yanti**

Kakaku tersayang

**Choirunnisa**

Almamater yang Penulis Banggakan

**Universitas Lampung**

## SANWACANA

### *Bismillaahirrahmaanirrahiim.*

Setelah penantian dan perjuangan yang cukup panjang, dengan mengucap syukur Alhamdulillah Penulis haturkan kepada Allah SWT. yang Maha pengasih dan Maha Penyayang karna berkat rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Kecenderungan Dan Penyebab Prilaku Non Voting Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Di Kecamatan Sragi Lampung Selatan)**”. Shalawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai suri tauladan bagi umatnya.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi Penulis untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Ibu Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Dedy Hermawan, M.Si., selaku Wakil Dekan Akademik dan Kerja Sama;
4. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si. selaku Wakil Dekan Umum dan Keuangan;

5. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M. IP., selaku Kepala Jurusan Ilmu Pemerintahan sekaligus Penguji Utama yang telah memberikan masukan, saran, kritik, dan motivasi sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terimakasih, semoga Allah SWT selalu melindungi langkah Bapak dan selalu diberikan kesehatan untuk terus membawa jurusan Ilmu Pemerintahan menjadi yang terbaik.
6. Bapak Darmawan Purba S.Ip.,M.IP., selaku Pembimbing Utama yang sudah banyak memberikan dukungan, motivasi, serta arahan sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, membangun semangat Penulis saat sedang mengalami kesulitan, dan mendorong Penulis untuk menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Terimakasih Pak, semoga kebaikan Bapak dibalas berkali-kali lipat, diterima amal ibadahnya, dan mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya.
7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski namanya tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis sangat bersyukur dapat diajar oleh Bapak dan Ibu dosen semua. Terimakasih telah memberikan ilmu yang bermanfaat dalam hidup saya.
8. Staff Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Mba Shella dan Bu Merta. Terimakasih sudah banyak membantu dan bersedia direpotkan dalam urusan administrasi perkuliahan, semoga Mba Shella dan Bu Merta senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
9. Kedua Oranguaku Ibu Evi yanti dan Bapak Edi Siswandy yang selalu setia menunggu dan yakin bahwa Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk kepercayaan, kesabaran dan kasih sayang yang tulus ikhlas dalam membesarkan, do'a, pengorbanan, semangat yang telah diberikan sehingga Penulis mampu melangkah sampai tahap ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan umur yang panjang, memuliakan kalian baik didunia maupun diakhirat.
10. Adella Fita Amarsa Kasablanca, Seseorang Spesial dalam hidup penulis yang membuat penulis terus berjuang demi mewujudkan tujuan hidup penulis. Dia

selalu ada untuk memotivasi penulis agar selalu menjadi kuat dan tegar setiap apapun yang terjadi. Terima kasih banyak dan rasa syukur terhadap Tuhan YME karna telah mempertemukan kita, Semoga engkau selalu di berikan kesehatan dan kebahagiaan di perjalanan hidupmu.

11. Kakakku Choirunnisa yang selalu menjadi alasan Penulis untuk menyelesaikan tanggung jawab ini.
12. Sahabat ku para orang sukses Dandy Rimanto dan Rima Firantika, Makasih banyak atas support dan bantuan kalian. Semoga kalian selalu diberikan kelancaraan dalam menggapai tujuan kalian.
13. Seluruh informan penelitian. Terima kasih atas kesediaannya untuk wawancara sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2018.
15. Teman seperjuangan Septa Nada yang selalu menyemangati dan meyakinkan bahwa kami berdua mampu menyelesaikan tanggung jawab ini.

Bandar Lampung, 17 Oktober 2024  
Penulis

Rahmando

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Masalah .....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
2.1 Pemilu.....	8
2.1.1 Pengertian Pemilu .....	8
2.1.2 Teori Pemilihan Umum .....	9
2.1.3 Asas dan Sistem Pemilihan Umum.....	14
2.2 Prilaku Pemilih .....	20
2.2.1 Pengertian Prilaku Pemilih .....	20
2.2.2 Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Prilaku Pemilih .....	21
2.2.3 Pendekatan dalam perilaku memilih.....	23
2.3 Partisipasi Politik.....	25
2.3.1 Pengertian Partisipasi Politik.....	25
2.3.2 Bentuk Partisipasi Politik .....	29
2.3.3 Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik .....	31
2.3.4 Tipologi Partisipasi Politik .....	33
2.3.5 Fungsi dan Tujuan Partisipasi Politik .....	36

2.4 Bentuk Perilaku <i>Non-Voting</i> .....	36
2.4.1 Faktor Psikologis .....	39
2.4.2 Sistem Politik.....	41
2.3.3 Kepercayaan Politik.....	42
2.3.4 Latar Belakang Sosial Ekonomi .....	43
2.5 Kerangka Fikir.....	44
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
3.1 Tipe Penelitian.....	47
3.2 Fokus Penelitian .....	48
3.3 Informan .....	48
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	49
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	50
3.6 Teknik Pengolahan Data .....	51
3.7 Teknik Analisis Data .....	52
3.8 Teknik Keabsahan Data.....	53
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
4.1 Gambaran Umum .....	54
4.1.1Kecamatan Sragi.....	54
4.1.3 Faktor-faktor Non Voting.....	56
4.2 Hasil.....	57
4.3 Pembahasan .....	59
4.3.1 Indikator Faktor Teknis .....	60
4.3.2 Indikator Faktor Teknis Politis .....	61
4.3.3 Indikator Faktor Politis .....	61
4.3.4 Indikator Faktor Ideologis .....	61
<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>63</b>
5.1 Kesimpulan.....	63
5.2 Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu .....	6
Tabel 3.1 Informan.....	49
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Sragi.....	55
Tabel 4.2 Pekerjaan Penduduk Kecamatan Sragi .....	56
Tabel 4.3. Daerah Pemilihan Wilayah 1 .....	57
Tabel 4.4 Daerah Pemilihan Wilayah 2 .....	57
Tabel 4.5 Daerah Pemilihan Wilayah 3 .....	58
Tabel 4.6 Daerah Pemilihan Wilayah 4 .....	58
Tabel 4.7 Daerah Pemilihan Wilayah 5 .....	58
Tabel 4.8 Daerah Pemilihan Wilayah 6 .....	58
Tabel 4.9 Daerah Pemilihan Wilayah 7 .....	58
Tabel 4.10 Bentuk Perilaku Non Voting Informan Penelitian.....	59
Tabel 4.11 Faktor Utama Perilaku Non Voting Informan Penelitian .....	61

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Pikir.....	46
Gambar 2. Denah Kecamatan Sragi .....	55

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemilihan Umum (Pemilu) pada hakekatnya merupakan pengakuan perwujudan hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintah. Dengan demikian, tujuan yang diharapkan adalah terpilihnya wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam lembaga perwakilan rakyat di tingkat pusat maupun daerah, yang mana dapat membawa isi hati nurani rakyat. Pemilu merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, yang memungkinkan masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politik mereka secara langsung. Dalam konteks ini, partisipasi politik menjadi salah satu indikator keberhasilan demokrasi. Tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kepercayaan terhadap sistem politik yang berjalan. Namun, rendahnya partisipasi pemilih, terutama dalam bentuk perilaku non voting atau golongan putih (golput), telah menjadi tantangan besar dalam setiap penyelenggaraan pemilu di berbagai daerah.

Fenomena golput di Indonesia bukanlah hal baru dan telah berkembang menjadi masalah yang kompleks. Pada masa Orde Baru, golput lebih sering dikaitkan dengan bentuk perlawanan politik terhadap sistem pemilu yang dianggap tidak demokratis. Pasca reformasi, golput tetap menjadi masalah, tetapi alasan di baliknya mulai bergeser. Masyarakat mulai menunjukkan sikap apatis akibat kekecewaan terhadap kinerja pemerintah, wakil rakyat, dan partai politik. Selain itu, sejumlah faktor lain, seperti masalah teknis dan administratif, pendidikan politik yang rendah, serta faktor sosial ekonomi, turut memengaruhi perilaku non

voting di Indonesia. Fakta yang ada pada setiap Pemilu Legislatif, selalu terdapat kelompok masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya, dan jumlahnya pun berdasarkan berbagai lembaga survei dan Pusat Kajian Politik di Indonesia terlihat bahwa Pemilu Legislatif pada masa Orde Baru (1971 s/d 1997) menghasilkan partisipasi pemilih yang relatif lebih tinggi sehingga persentase kelompok masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya berada dibawah 10% jika dibandingkan pada era reformasi (1999 s/d 2009) sehingga dapat dikatakan, ada kecenderungan penurunan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suaranya, dimana angka pemilih yang tidak menggunakan hak suara atau oleh sebagian besar kalangan lebih sering dikenal dengan istilah Pemilih “Golongan Putih (Golput)” yang mengalami peningkatan, pada pemilu 1999 berkisar 10,21%, meningkat menjadi 23,34% pada Pemilu 2004. Pemilih Golput ini, termasuk pula mereka yang terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya yaitu mereka yang sedang tidak berada di wilayah domisili saat pelaksanaan pemilihan, dalam perjalanan, meninggal, sedang sakit keras yang tidak memungkinkan untuk memilih dan termasuk mereka yang datang ke TPS namun dengan berbagai alasan suaranya dinyatakan rusak atau tidak dihitung.

Dalam perjalanan sejarah Pemilu, istilah Golput pertama kali muncul dalam media masa ketika ada sekelompok mahasiswa dan pelajar memproklamasikan “golongan putih” yang mana gerakan mereka memelopori sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu tahun 1971. Adapun alasan mereka tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan aturan main demokrasi dalam Pemilu tahun 1971 tidak sehat. Ibarat dalam suatu pertandingan, aturan mainnya sudah dilanggar terlebih dahulu, dan oleh karenanya pertandingan itu harus segera dihentikan, sebab jika terus dilanjutkan maka yang akan terjadi adalah anarki, dimana berlaku hukum siapa yang kuat dia yang menang.

Salah satu faktor utama yang memengaruhi perilaku non voting adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik. Ketidakpuasan terhadap pemerintah dan wakil rakyat sering kali menjadi alasan utama bagi masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Hal ini dipicu oleh kekecewaan terhadap

pemimpin yang dianggap tidak memenuhi janji kampanye, serta persepsi bahwa pemilu hanya menjadi alat bagi elit politik untuk mempertahankan kekuasaan tanpa memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Selain itu, kurangnya pendidikan politik juga berkontribusi terhadap tingginya angka golput. Banyak masyarakat, terutama di pedesaan, yang kurang memahami pentingnya partisipasi dalam pemilu. Sosialisasi mengenai proses dan tujuan pemilu sering kali tidak sampai ke seluruh lapisan masyarakat, sehingga mereka merasa bahwa pemilu bukanlah prioritas dalam kehidupan mereka.

Rendahnya pemahaman ini juga terlihat pada pemilih pemula yang sering kali bingung dengan tata cara pemilu dan visi-misi kandidat yang tidak jelas. Faktor sosial ekonomi turut memengaruhi perilaku pemilih. Kesibukan masyarakat dalam mencari nafkah sering kali membuat mereka tidak memiliki waktu untuk mengikuti pemilu. Kondisi ekonomi yang sulit juga menyebabkan banyak orang lebih fokus pada kebutuhan sehari-hari dibandingkan urusan politik. Selain itu, kesenjangan sosial yang tinggi dapat menimbulkan perasaan tidak relevan atau tidak terhubung dengan proses politik, sehingga masyarakat memilih untuk tidak berpartisipasi.

Kualitas kandidat dan partai politik juga menjadi salah satu alasan mengapa masyarakat enggan memilih. Ketika kandidat dianggap tidak memiliki kapabilitas atau integritas yang memadai, masyarakat cenderung kehilangan minat untuk berpartisipasi. Hal ini diperburuk oleh praktik politik uang, konflik internal partai, dan janji-janji kampanye yang tidak realistis. Semua ini menciptakan persepsi bahwa pemilu bukanlah mekanisme yang efektif untuk membawa perubahan. Selain itu, kendala teknis dan administratif sering kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan pemilu. Di beberapa daerah di Lampung Selatan, kesalahan dalam pendataan pemilih menyebabkan banyak masyarakat tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sulit dijangkau dan kurangnya fasilitas untuk pemilih berkebutuhan khusus juga menjadi masalah yang mengurangi tingkat partisipasi. Faktor psikologis dan budaya turut berperan dalam membentuk perilaku non voting. Sikap apatis

terhadap politik sering kali muncul karena masyarakat merasa bahwa suara mereka tidak akan membawa perubahan. Budaya politik yang paternalistik juga membuat masyarakat cenderung menyerahkan keputusan politik kepada pihak lain, seperti tokoh masyarakat atau keluarga. Lingkungan sosial yang tidak mendukung partisipasi politik juga dapat memengaruhi keputusan individu untuk tidak menggunakan hak pilihnya.

Mahasiswa, sebagai kelompok intelektual yang diharapkan menjadi motor penggerak perubahan, ternyata juga menunjukkan kecenderungan non-voting. Penelitian oleh Hertanto (2015) menunjukkan bahwa di Lampung, banyak mahasiswa yang memilih berdasarkan popularitas kandidat atau kedekatan emosional, tanpa mempertimbangkan visi dan misi kandidat secara mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, kesadaran politik yang substansial masih menjadi tantangan.

Studi lain yang menarik perhatian adalah analisis perilaku politik santri pada Pilkada Lampung Selatan tahun 2020. Barokah (2021) menemukan bahwa santri dari pesantren tradisional cenderung mengikuti arahan kiai dalam menentukan pilihan politik, sementara santri dari pesantren modern menunjukkan independensi yang lebih besar. Perbedaan ini mencerminkan bagaimana faktor lingkungan sosial dan pendidikan membentuk preferensi politik individu.

Melihat kompleksitas fenomena non-voting di Lampung Selatan, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan pendidikan politik yang memadai kepada masyarakat. Pendidikan politik ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menggunakan hak pilih sebagai bagian dari tanggung jawab demokratis.

Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat penting dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. KPU perlu memastikan bahwa seluruh proses pemilu berjalan dengan transparan, adil, dan inklusif. Sosialisasi dan edukasi

politik harus dilakukan secara lebih masif, terutama di daerah-daerah yang memiliki tingkat partisipasi rendah. Upaya untuk meningkatkan kualitas daftar pemilih, memperbaiki infrastruktur pemilu, dan mempermudah akses ke TPS juga perlu diperkuat. Lampung Selatan, dengan segala kompleksitas sosiopolitiknya, menjadi cerminan dari tantangan yang dihadapi oleh demokrasi di tingkat lokal. Fenomena non voting bukan hanya masalah teknis, tetapi juga mencerminkan dinamika kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif antara pemerintah, KPU, partai politik, dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini dan memperkuat demokrasi di daerah tersebut.

Kajian mengenai fenomena non voting di Lampung Selatan memiliki relevansi yang besar dalam konteks pembangunan demokrasi di daerah tersebut. Dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi perilaku non voting, pemerintah dan penyelenggara pemilu dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Penelitian ini penting tidak hanya untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penyebab perilaku non voting, tetapi juga sebagai pijakan dalam mengembangkan strategi yang dapat meningkatkan kesadaran politik masyarakat dalam pemilihan umum.

Pemilihan umum Presiden maupun Pemilihan Langsung Kepala Daerah. Disinyalir Pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak suaranya cenderung mengalami peningkatan, yaitu 24,4% pada Pemilu Legislatif Tahun 2004 menjadi 29,54 % pada 2009. Hal yang sama juga terlihat pada pemilihan Presiden (Pilpres) I sebesar 28, 8 % menjadi 34,5% pada Pilpres II Tahun 2004. Sementara, pada Pemilihan Langsung Gubernur (Pilgub) 2005 adalah 36,3 % dan pada pemilu legislatif 2009 meningkat menjadi 29,54%. Berangkat dari pemaparan sebelumnya menarik dilakukan penelitian tentang penyebab perilaku non-voting dalam pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024 . Penelitian ini bertujuan untuk meng-ungkapkan:(1) Bentuk perilaku non-voting dalam pemilihan umum ( Pemilu ) tahun 2024 di Kecamatan Sragi, Kabupaten Lampung Selatan

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Darmawan Purba / 2017	Perilaku non voting dalam pemilihan kepala daerah Lampung Timur tahun 2015 (studi di kecamatan way jepara kabupaten lampung timur)	Membahas tentang penyebab dan faktor faktor terjadinya prilaku non voting pada pemilihan Kepala Daerah di Lampung Timur, Faktor penyebab terjadinya prilaku non voting antara lain Faktor teknis Faktor ideologis dan Faktor kurangnya informasi tentang Pilkada oleh KPUD
2	Mulyadi M / 2015	<i>Analisis kecenderungan dan penyebab perilaku non voting masyarakat kota solok,</i>	Membahas tentang beberapa kecenderungan prilaku non voting yang di teliti oleh mulyadi(2015) mengenai penyebab non voting pada masyarakat kota solok
3	Ardi Yanto / 2017	<i>Analisis penggunaan hak pilih masyarakat pada pemilihan kepala daerah di kabupaten pringsewu tahun 2017</i>	Membahas mengenai penggunaan hak pilih masyarakat pringsewu tahun 2017 mengenai pemilihan kepala daerah di kabupaten pringsewu
4	Cc purba, a adlin / 2017	Hubungan Faktor Sosiologis Dan Faktor Psikologis Terhadap Prilaku Memilih Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Pelelawan Tahun 2015	Menguraikan Hubungan Faktor Sosiologis Dan Faktor Psikologis Terhadap Prilaku Memilih Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015
5	Darwin Tarigan / 2018	Prilaku Tidak Memilih Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015	Menjelaskan mengenai prilaku pemilih pada masyarakat kota medan dalam pemilihan walikota dan walikota medan pada tahun 2015

*Sumber : Data diolah oleh Peneliti (2024)*

Berdasarkan kajian penelitian tersebut dapat diambil faktor kesamaan di dalamnya yaitu kecenderungan dan perilaku non voting yang dilakukan oleh masyarakat dalam memberikan partisipasi atau hak pilih dalam pemilihan umum. Penulis mencoba memberikan perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan untuk

bisa mengetahui penyebab dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat melakukan perilaku non voting pada pemilihan kepala daerah. Hal ini merupakan suatu analisis yang menarik untuk dikaji, oleh sebab itu perlu diteliti kembali, sehingga judul penelitian yang ditetapkan adalah: “Analisis Kecenderungan Dan Penyebab Prilaku Non Voting Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Di Kecamatan Sragi Lampung Selatan)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas rumusan masalah dalam penelitian ini,yaitu :

Faktor-faktor penyebab prilaku non voting pada pemilihan umum tahun 2024 di Kecamatan Sragi Lampung Selatan ?

## **1.3 Tujuan Masalah**

Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui Faktor-faktor Penyebab Prilaku Non Voting Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kecamatan Sragi Lampung Selatan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan dalam pengetahuan dalam kajian ilmu pemerintahan terutama pada khasanah ilmu-ilmu sosial politik pada umumnya, yang terkhusus pada pembahasansan mengenai Penyebab Prilaku Non Voting Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kecamatan Sragi.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan kontribusi pemikiran bagi politik lokal dan otonomi daerah sebagai bahan rujukan atau tolok ukur Penyebab Prilaku Non Voting Pemilu Tahun 2024 Di Kecamatan Sragi.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Pemilu**

#### **2.1.1 Pengertian Pemilu**

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum (Pemilu) menurut Haris (2006: 10) merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat, yang bersifat langsung, terbuka, masal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi.

Pasal 1 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum disebutkan dan dijelaskan tentang pengertian pemilihan umum, selanjutnya disebut pemilu, adalah : Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huntington dalam Rizkiyansyah (2007: 3) menyatakan bahwa sebuah negara bisa disebut demokratis jika didalamnya terdapat mekanisme pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala atau periodik untuk melakukan sirkulasi elite”.

Menurut Dani (2006:11) pemilu merupakan sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar memancar ke bawah sebagai suatu kewibawaan yang sesuai dengan keinginan rakyat dan untuk rakyat.

Menurut Rahman (2002: 194), pemilu merupakan cara dan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat guna menjalankan kedaulatan rakyat, maka dengan sendirinya terdapat berbagai sistem pemilihan umum. Sedangkan, Rizkiyansyah (2007 : 3) “Pemilihan Umum adalah salah satu pranata yang paling representatif atas berjalannya demokrasi, tidak pernah ada demokrasi tanpa pemilihan umum”.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pemilihan umum sebagai sarana terwujudnya demokrasi. Pemilihan umum adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi dan bahkan menimbulkan hal-hal yang menderitakan rakyat, tetapi harus tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya Undang-Undang Dasar 1945.

### **2.1.2 Teori Pemilihan Umum**

Permana dalam Pradhanawati (2005: 85) kata kunci dari pemilu langsung oleh rakyat adalah “kedaulatan rakyat”. Dengan demikian, reputasi demokrasi tidak diragukan lagi adalah pemaknaan yang sesungguhnya dari kedaulatan rakyat itu sendiri. Schumpeter dalam Sorensen (2003: 14) merumuskan pengertian demokrasi secara sederhana merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberikan kesempatan untuk memilih salah satu di antara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara.

Pengertian demokrasi menunjukkan bahwa keikutsertaan rakyat merupakan kunci utama dalam menjalankan sistem pemerintahan yang demokrasi.

Keikutsertaan rakyat dalam sistem pemerintahan bisa dilakukan secara langsung oleh rakyat itu sendiri maupun melalui perwakilan hal tersebut dapat terwujud dengan dilaksanakannya Pemilihan Umum di Negara Indonesia.

Mayo dalam Kristiadi (2006: 117) memberikan definisi demokrasi sebagai berikut:

“Sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik”.

Pendapat Mayo tersebut oleh Kristiadi (2006: 118) disimpulkan “bahwa demokrasi tidak hanya merupakan suatu sistem pemerintahan, tetapi juga 10 suatu gaya hidup serta tata masyarakat tertentu, karena itu juga mengandung unsur-unsur moral. Dalam rangka itu dapat dikatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai (values)". Nilai-nilai dalam demokrasi tersebut menurut Mayo dalam Kristiadi (2008: 118) adalah :

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (institutionalized peaceful statement of conflict),
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (peacefull change in a changing society),
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (orderly succession of rules),
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (minimum of coercion),
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (diversity),
6. Menjamin tegaknya keadilan

Diamond, Linz dan Lipset dalam Sorensen (2003: 19) memaknai demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan yang memenuhi tiga kondisi-kondisi berikut:

1. Kompetisi yang luas dan bermakna di antara individu dan kelompok organisasi (khususnya partai-partai politik) pada seluruh posisi kekuasaan pemerintah yang efektif, dalam jangka waktu yang teratur dan meniadakan penggunaan kekerasan;
2. Tingkat partisipasi politik yang inklusif dalam pemilihan pemimpin dan kebijakan, paling tidak melalui pemilihan bebas secara teratur, dan tidak ada kelompok sosial (dewasa) utama yang disingkirkan;
3. Tingkat kebebasan politik dan sipil, yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan untuk mendirikan dan menjadi anggota organisasi, yang cukup untuk memastikan integritas partisipasi dan kompetisi politik.

Berdasarkan nilai-nilai beserta kondisi-kondisi demokrasi di atas maka dalam pemilihan umum juga terdapat nilai-nilai dan kondisi-kondisi tersebut. Pemilihan umum dapat dikatakan sebagai suatu “pesta demokrasi” di negara Indonesia. Mencermati praktik pemilu dalam sistem politik modern, Fatah dalam Rizkiyansyah (2007: 4) menyatakan bahwa “Pemilu dapat dibedakan menjadi dua tipe. Pertama, pemilu sebagai formalitas politik, yakni, pemilu hanya dijadikan alat legalisasi pemerintahan nondemokratis. Pemilunya sendiri dijalankan secara tidak demokratis; Kedua, yakni pemilu sebagai alat demokrasi, pemilu dijalankan secara jujur, bebas, bersih, kompetitif, dan adil. pemerintah yang menyelenggarakan Pemilu bahkan kerap kali menerima kenyataan bahwa Pemilu yang mereka adakan justru menyingkirkan mereka dari tampuk kekuasaan.”

Pemilu kepala daerah yang dilaksanakan di Indonesia saat ini merupakan pemilu yang ditempatkan pada tipe kedua yaitu pemilu sebagai alat demokrasi untuk menciptakan suatu pemerintahan yang representatif yang dijalankan secara jujur, bebas, bersih, kompetitif dan adil, berbeda dengan

pemilu-pemilu yang dilaksanakan pada zaman orde baru. Pemilu pada zaman orde baru merupakan pemilu tipe pertama yaitu sebagai formalitas politik untuk melegalisasi pemerintahan Soeharto.

Fungsi pemilu antara lain seperti yang diungkapkan oleh Sanit dalam Pito (2007: 307) yang mengklasifikasikan ada empat fungsi pemilihan umum, yaitu legitimasi politik, terciptanya perwakilan politik, sirkulasi elite politik dan pendidikan politik. Selain fungsi yang diungkapkan oleh Sanit, pemilu juga memiliki fungsi seperti yang diungkapkan oleh Croisant dalam Pito (2007: 306) yang menyatakan secara fungsional pemilu harus memenuhi tiga tuntutan yaitu :

1. Pemilu harus mewakili rakyat dan kehendak politik pemilih
2. Pemilu harus dapat mengintegrasikan rakyat
3. Keputusan, sistem pemilu harus menghasilkan mayoritas yang cukup besar guna menjamin stabilitas pemerintahan dan kemampuannya untuk memerintah (governabilitas).

Berdasarkan penjelasan para ahli, dapat disimpulkan bahwa melalui pemilu sistem demokrasi dapat diwujudkan. Legitimasi kekuasaan yang diperoleh pemerintah menjadi kuat dan absah karena hal tersebut merupakan hasil pikiran rakyat yang memiliki kedaulatan. Selain sebagai mekanisme demokrasi, pemilu ini juga memiliki tujuan sebagai pendidikan politik rakyat yang dapat menumbuhkembangkan kesadaran rakyat akan hak dan kewajiban politiknya.

Dalam melaksanakan pemilu diperlukan suatu sistem yang representatif yang sesuai dengan situasi dan kondisi negara/wilayah yang akan menyelenggarakannya. Saragih dalam Pito (2006: 304) mengatakan bahwa dalam sistem pemilihan umum mengandung karakteristik sistem yang meliputi electoral laws atau hukum dasar pemilu dan electoral process atau proses pemilu.

Electoral laws merupakan pelaksanaan sistem yang sudah ada aturaturannya secara umum. Aturan yang menata bagaimana pemilu dijalankan, bagaimana distribusi hasil pemilu ditetapkan dan sebagainya. Sedangkan electoral process yaitu mekanisme pelaksanaan suatu pemilu, antara lain siapa panitia penyelenggaraan pemilu, partai/organisasi peserta pemilu, penentuan calon-calon, cara dan tempat kampanye, kotak suara, tempat dan jumlah TPS, saksi, perpindahan pemilihan dan sebagainya.

Makna demokrasi dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan sistem demokrasi salah satunya adalah melalui pemilihan umum yang melibatkan partisipasi politik warga negara sebanyak-banyaknya. Partisipasi politik merupakan kriterium penting demokrasi. Krisis partisipasi politik terjadi jika tindakan-tindakan tidak tertampung atau tersalurkan melalui dewan perwakilan, media massa, organisasi-organisasi sosial politik lembaga pemerintahan atau lembaga-lembaga yang sah lainnya.

Krisis partisipasi menurut Kusumowidagdo dalam Rais (2005: 158), adalah konflik atau bentrokan yang terjadi apabila elite pemerintah menganggap tidak sah tuntutan-tuntutan atau tingkah laku individu-individu atau kelompok yang ingin berperan serta dalam sistem politik (Negara). Beberapa kondisi yang dapat menimbulkan krisis partisipasi yaitu:

1. Jika elite pemerintah menganggap dirinya saja yang berhak memerintah oleh karena itu menolak tuntutan-tuntutan kelompok-kelompok sosial politik untuk berperan serta dalam pemerintahan.
2. Jika organisasi-organisasi yang dibentuk kelompok-kelompok masyarakat untuk menyalurkan kepentingan mereka dianggap tidak sah oleh pemerintah.
3. Cara-cara yang digunakan kelompok-kelompok masyarakat dianggap tidak sah oleh elite pemerintahan
4. Jika jenis tuntutan yang dikemukakan kelompok-kelompok masyarakat dianggap tidak sah oleh pemerintah.

Pada sistem yang demokratis, tujuan dari pelaksanaan pemilu pun harus mencerminkan adanya kehendak dan partisipasi rakyat. Pemilihan Umum memiliki beberapa tujuan. Menurut Surbakti (1992: 181) ada tiga hal dalam tujuan pemilu, yaitu :

1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintah dan alternatif kebijakan umum.
2. Pemilu juga dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat yang terpilih melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi tetap terjaga
3. Pemilu merupakan sarana memobilisasikan dan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintah dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Jadi tujuan pemilu adalah sarana untuk memilih wakil rakyat, wakil daerah, membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan legitimasi dari rakyat serta memberdayakan warga negara dalam kegiatan politik. Dan fungsi dari pemilu adalah sebagai alat demokrasi.

Berdasarkan pemaparan dari para ahli, dapat disimpulkan bahwa demokrasi saat ini merupakan sistem pemerintahan yang memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh rakyat. Baik hak untuk ikut serta dalam pemerintahan maupun haknya sebagai warga sipil. Dalam demokrasi, rakyat harus diikutsertakan dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan politik, termasuk dalam menentukan seorang pemimpin. Salah satu upaya untuk mengikutsertakan rakyat dalam pemerintahan adalah melalui pemilihan umum.

### **2.1.3 Asas dan Sistem Pemilihan Umum**

Pemilihan umum di Indonesia menganut asas “Luber” yang merupakan singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia”. Asas “Luber” sudah ada sejak zaman Orde Baru. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas “Jurdil” yang merupakan singkatan dari “Jujur dan Adil”. Adapun yang

dimaksud dengan asas “Luber dan Jurdil” dalam pemilu. Asas “Luber 15 dan Jurdil” pemilu menurut UU No. 10 tahun 2008, tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD. Dalam UU No. 10 Tahun 2008, asas pemilihan umum meliputi :

1. Langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.
2. Umum, artinya semua WN yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak di pilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian).
3. Bebas, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun.
4. Rahasia, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (secret ballot).
5. Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
6. Adil, dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Sedangkan dalam UU No. 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas dalam pemilihan umum terdapat dalam Pasal 2 yaitu:

1. Mandiri
2. Jujur
3. Adil
4. Kepastian hukum
5. Tertib penyelenggara pemilu

6. Keterbukaan
7. Proporsionalitas
8. Profesionalitas
9. Akuntabilitas
10. Efisiensi dan Efektivitas

Menurut Rahman (2002: 177) sistem pemilihan umum biasanya diatur dalam perundang-undangan, setidaknya mengandung tiga variabel pokok, yaitu :

1. Penyuaaraan (balloting) Artinya tata cara yang harus diikuti pemilih yang berhak dalam memberikan suara.
2. Daerah pemilihan umum (electoral district). Artinya ketentuan yang mengatur berapa jumlah kursi wakil rakyat untuk setiap daerah pemilihan.
3. Formula pemilihan. Artinya rumus yang digunakan untuk menentukan siapa atau partai politik apa yang memenangkan kursi di suatu daerah pemilihan”.

Konstitusi Indonesia mengatur mengenai pemilihan umum di Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E, untuk menjamin hak rakyat indonesia dalam memilih pemimpin dan wakil pilihan mereka. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E dijelaskan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum.

Darmastuti dan Maryanah (2004: 48) menjelaskan ada beberapa prinsip-prinsip pemilihan umum yang perlu dijamin, yaitu :

1. Keadilan Prinsip ini sangat diperlukan agar seluruh rakyat memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Selain itu prinsip ini juga diperlukan agar seluruh peserta pemilihan umum, baik yang berupa partai politik, perorangan, maupun independen mendapat perlakuan yang sama

dari pelaksanaan pemilihan umum. Tanpa keadilan, maka tidak ada jaminan bahwa kedaulatan rakyat dapat direalisasikan.

2. Kejujuran Kejujuran bukan hanya perlu ditujukan kepada pelaksanaan pemilihan umum sehingga hasil pemilihan umum akan sah (legitimate) karena tidak terjadi kecurangan administrasi dan perhitungan, tetapi juga perlu 17 ditujukan juga oleh para peserta pemilu (baik partai, perorangan, maupun kelompok independen) dan para pemilih.
3. Umum Prinsip ini mengandung pengertian bahwa seluruh rakyat tanpa kecuali memiliki hak untuk memilih. Prinsip umum ini dikemukakan untuk menjamin hilangnya berbagai faktor yang pada masa lalu sering menjadi dasar diskriminasi, antara lain karena faktor status sosial, warna kulit dan ras, jenis kelamin, agama, pandangan politik dan sebagainya.
4. Bebas Prinsip ini sangat esensial untuk menjamin agar pemilu tidak dilaksanakan dengan cara intimidasi. Rakyat harus memiliki kebebasan mengekspresikan pilihan politiknya karena prinsip ini akan menjamin diperolehnya informasi tentang kehendak rakyat yang sesungguhnya, berkenaan dengan siapa-siapa yang dipercaya menjadi wakil atau menjadi pejabat politik oleh rakyat, sekaligus apa ideologi, program dan aktivitas politik yang dipilih oleh sebagian besar rakyat.
5. Kerahasiaan Kerahasiaan pilihan adalah prinsip pemilu yang sangat penting karena prinsip ini menjamin pemilih tidak akan mendapat intimidasi karena pilihan politiknya.
6. Langsung Rakyat harus langsung memilih pilihan politiknya. Karena itu administrasi pemilu dirancang sedemikian rupa sehingga setiap orang termasuk penyandang cacat, dapat langsung memilih tanpa perlu mewakilkannya kepada orang lain.

Di Indonesia telah berulang kali diselenggarakan pemilihan umum yang disebut sebagai pesta demokrasi rakyat Indonesia, baik sewaktu orde lama, orde baru dan orde reformasi (Syafiie, 2005: 136). Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilu, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok yaitu sistem distrik (single-member constituency dan sistem

proporsional/perwakilan berimbang (multi-member constituency). (Kristiadi, 2008: 461).

Sistem distrik (single-member constituency) diselenggarakan berdasarkan lokasi daerah pemilihan, dalam arti tidak membedakan jumlah penduduk, tetapi berkiblat pada tempat yang sudah ditentukan. Jadi daerah yang sedikit penduduknya memiliki wakil yang sama dengan daerah yang padat penduduknya. Oleh karena itu, sudah barang tentu akan banyak suara yang terbuang, tetapi karena wakil yang akan dipilih adalah orangnya langsung, maka pemilih akan akrab dengan wakilnya (personen stelse), data distrik biasanya memiliki satu wakil (Syafie, 2005: 136-137).

Adapun keuntungan dengan menggunakan sistem distrik menurut Kristiadi (2006: 466) adalah sebagai berikut :

1. Sistem ini lebih mendorong ke arah integritas partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu.
2. Fragmentasi partai dan kecenderungan membentuk partai baru dapat dibendung.
3. Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh komunitasnya, sehingga hubungan dengan konstituen lebih erat.
4. Bagi partai besar sistem ini menguntungkan karena melalui distortion effect dapat meraih suara dari pemilih-pemilih lain, sehingga memperoleh kedudukan mayoritas.
5. Lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen, sehingga tidak perlu diadakan koalisi dengan partai lain.
6. Sistem ini sederhana dan murah untuk diselenggarakan.

Selain keuntungan dalam menggunakan sistem distrik ini Kristiadi (2006: 467) juga mengungkapkan beberapa kelemahannya. Kelemahan tersebut antara lain :

1. Sistem ini kurang memperhatikan adanya partai-partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika golongan ini terpencar dalam beberapa distrik
2. Sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa calon yang kalah dalam suatu distrik, kehilangan suara-suara yang telah mendukungnya. Hal ini berarti bahwa ada sejumlah suara yang tidak diperhitungkan sama sekali
3. Sistem distrik dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang plural karena terbagi dalam kelompok etnis, religious, dan tribal
4. Ada kemungkinan si wakil cenderung untuk lebih memperhatikan kepentingan distrik serta warga distriknya, daripada kepentingan nasional.
5. Penggunaan sistem distrik ini lebih cocok pada negara yang masyarakatnya homogen dan hanya memiliki dua partai (dwi party).

Sistem distrik ini lebih cenderung mengarah pada desentralisasi. Di Indonesia sistem distrik ini digunakan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, pemilihan umum untuk memilih anggota DPD. Sistem proporsional/perwakilan berimbang (multi-member constituency) berkiblat kepada jumlah penduduk yang akan menjadi peserta pemilih. Sistem ini dimaksud untuk menghilangkan beberapa kelemahan dari sistem distrik. Rizkiyansyah (2007: 7) menyatakan bahwa “Sistem proporsional adalah sistem yang muncul karena ada ketidakpuasan terhadap sistem distrik. Gagasan pokok sistem ini adalah jumlah kursi yang diperoleh oleh suatu partai adalah sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya dari masyarakat.”

Dalam sistem ini setiap suara, dalam arti bahwa suara lebih yang diperoleh oleh suatu partai atau golongan dalam sesuatu daerah pemilihan dapat ditambahkan pada jumlah suara yang diterima oleh partai atau golongan itu dalam daerah pemilihan lain, untuk menggenapkan jumlah suara yang diperlukan guna memperoleh kursi tambahan. Sama halnya dengan sistem distrik, sistem proporsional ini juga memiliki kelebihan dan kelemahan.

Mengutip pendapat Kristiadi (2006: 467), bahwa kelebihan sistem ini adalah:

1. Sistem proporsional dianggap representatif, karena jumlah kursi dalam parlemen sesuai dengan jumlah suara masyarakat yang diperoleh dalam pemilihan umum ;
2. Sistem proporsional dianggap lebih demokratis dalam arti lebih egalitarian karena praktis tanpa ada distorsi.

Sedangkan untuk kelemahannya, penulis pun masih mengutip pendapat Kristiadi (2006: 469). Kelemahan dalam sistem proporsional ini antara lain:

1. Sistem ini kurang mendorong partai-partai untuk berintegrasi atau bekerja sama satu sama lain dan memanfaatkan persamaan-persamaan yang ada, tetapi sebaliknya, cenderung mempertajam perbedaan
2. Sistem ini mempermudah fragmentasi partai. Jika timbul konflik dalam suatu partai anggotanya cenderung memisahkan diri dan mendirikan partai baru;
3. Sistem proporsional memberikan kedudukan yang kuat pada pemimpin partai;
4. Wakil yang terpilih kemungkinan renggang ikatannya dengan konstituennya;
5. Karena banyaknya partai yang bersaing, sulit bagi suatu partai untuk meraih mayoritas dalam parlemen, yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan.

Pada sistem pemilu proporsional yang diutamakan dan dikampanyekan adalah program atau ideologi partai-partai politik tersebut. Berbeda dengan sistem distrik yang lebih mengutamakan kepopuleran seseorang . Sistem proporsional ini di Indonesia digunakan pada saat penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD.

## **2.2 Prilaku Pemilih**

### **2.2.1 Pengertian Prilaku Pemilih**

Perilaku pemilih merupakan perilaku yang ditunjukkan oleh masyarakat untuk memilih kandidat tertentu dalam pemilu dikarenakan faktor-faktor

tertentu Dalam diri masyarakat tersebut sebagai pemilih. Dalam kehidupan masyarakat perilaku pemilih dapat dipengaruhi oleh tiga aspek. Ketiga aspek tersebut muncul atas beberapa perilaku pemilih yang terjadi di masyarakat, diantara ketiga pendekatan tersebut yang pertama, pendekatan sosiologis atau social determinism approach. Pendekatan ini lebih mengarah kepada eksistensi individu dalam suatu kelompok maupun organisasi yang mempengaruhi perilaku seseorang dalam memilih partai politik.

Selanjutnya, Kedua, pendekatan psikologis dimana para pendukung pendekatan ini beranggapan bahwa sikap seseorang merupakan refleksi dan kepribadian dirinya, dan merupakan faktor yang sangat menentukan dalam membuat pilihan. Serta ketiga, pendekatan rasional atau rational choice dimana dalam tipikal pemilih untuk pendekatan ini terletak pada apa yang diperoleh jika memilih suatu partai politik. Karena, pemilih lebih memperhitungkan perihal untung dan rugi dalam menentukan pilihan.(Pradhanawati, 2009 : 21).

### **2.2.2 Faktor – faktor Yang Mempengaruhi Prilaku Pemilih**

1. Faktor yang pertama karena Pengaruh Keluarga Dan Saudara Dalam Memilih, Pengaruh keluarga dan saudara juga mempengaruhi pilihan seseorang dalam memilih, hal ini dikarenakan seseorang akan memilih yang berasal dari keluarga atau sanak saudara mereka sendiri. Pilihan ini dilatari ketertarikan kesukaan yang begitu kuat dalam diri seseorang.
2. Kedua Pengaruh Tempat Tinggal Calon Kandidat, Wilayah tempat tinggal kandidat secara teoritik dapat mempengaruhi perilaku memilih seseorang, dengan mempertimbangkan seorang calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berasal dari tempat tinggal mereka maka pemilih menjatuhkan pilihan mereka terhadap calon tersebut atas dasar pertimbangan satu lokasi tempat tinggal dengan pasangan yang mereka dukung atau bahasa lainnya satu kampung halaman, sama halnya dengan pemilih yang mendukung pasangan H. Muhammad Amru-Said Sani masyarakat memilih mereka dikarenakan satu tempat tinggal dengan pasangan yang mereka dukung.

3. Ketiga Pengaruh Partai Dalam Memilih, Partai politik mempunyai posisi dan peran yang sangat penting dalam setiap perkembangan demokrasi, Partai politik adalah sarana yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu daerah yang bercirikan mandiri dalam hal financial, memiliki haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut menyumbang perkembangan politik sebagai suprastruktur politik.
4. Keempat Pengaruh Ketokohan dalam Memilih, calon kandidat tersebut akan ditawarkan kepada masyarakat sebagai pemilih yang terdaftar. Oleh karena itu seseorang calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang layak harus calon yang benar-benar memiliki pengaruh di masyarakat, calon yang memiliki charisma dan akan disambut positif masyarakat dan dapat berpengaruh terhadap perilaku memilih masyarakat Tersebut.
5. Kelima Pengaruh Isu Dalam Pemilihan, Isu yang ditawarkan oleh seseorang calon bupati/wakil bupati sangat berpengaruh nantinya dalam pilihan masyarakat.

Isu-isu yang berkembang dalam kampanye yang diberikan calon bupati/wakil bupati Daerah dapat berupa isu politik, ekonomi, pendidikan yang selanjut dianalisa oleh masyarakat apakah bisa diterima atau tidak. Demikian kecendrungan masyarakat menjatuhkan pilihan terhadap kandidat yang mencalonkan diri.

Selanjutnya berbagai faktor mempengaruhi perilaku pemilih di Indonesia, antara lain:

1. Agama

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, agama memainkan peran signifikan dalam politik Indonesia. Pemilih sering mempertimbangkan afiliasi agama kandidat dan sikap mereka terhadap isu-isu keagamaan.

## 2. Etnisitas

Indonesia adalah negara multietnis, dan identitas etnis dapat mempengaruhi preferensi pemilih. Pemilih mungkin cenderung memilih kandidat dari etnis yang sama atau yang dianggap mewakili kepentingan etnis mereka.

## 3. Kelas Sosial dan Ekonomi

Status ekonomi dan kelas sosial juga mempengaruhi perilaku pemilih. Pemilih dari kelas ekonomi rendah mungkin lebih rentan terhadap politik uang, sementara mereka yang berpendidikan tinggi cenderung lebih kritis dan rasional dalam membuat keputusan politik.

## 4. Media Sosial

Dengan meningkatnya penggunaan media sosial, platform ini menjadi sumber informasi utama bagi banyak pemilih, terutama generasi muda. Media sosial mempengaruhi persepsi politik dan dapat membentuk opini publik melalui penyebaran informasi, baik yang akurat maupun yang menyesatkan.

## 5. Politik Uang

Praktik politik uang masih menjadi tantangan dalam pemilu di Indonesia. Beberapa pemilih menerima uang atau barang sebagai imbalan untuk memilih kandidat tertentu, yang dapat merusak integritas proses demokrasi.

Perilaku pemilih di Indonesia dipengaruhi oleh kombinasi kompleks dari faktor sosiologis, psikologis, ekonomi, dan media. Memahami dinamika ini penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan partisipasi politik di Indonesia. Pendidikan politik, peningkatan literasi media, dan penegakan hukum yang tegas terhadap praktik politik uang menjadi langkah-langkah penting untuk mencapai tujuan tersebut.

### **2.2.3 Pendekatan dalam perilaku memilih**

Negara yang demokratis terhadap perilaku politik warga negara sering kali dikaitkan dengan kegiatan tiap individu dalam memilih pemimpin maupun wakilnya dalam pemilihan umum.

Menurut Cholisin (2007:154) terdapat lima pendekatan dalam perilaku memilih yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan struktural, merupakan aktivitas memilih dapat dilihat sebagai produk dari kondisi struktur yang lebih luas seperti, sistem pemilihan umum, sistem partai dan struktur sosial. (kondisi)
2. Pendekatan sosiologis, pendekatan ini lebih mengaitkan aktivitas pemilih dengan kondisi sosial. Dapat dikatakan bahwa pilihan suatu individu dalam pemilihan umum dapat terpengaruh berdasarkan latar belakang sosial ekonomi, tempat tinggal, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, kasta dan agama.
3. Pendekatan ekologis, pendekatan ini hanya relevan jika disuatu daerah pemilihan terdapat perbedaan secara signifikan pada karakteristik pemilih berlandaskan unit teritorial seperti kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa.
4. Pendekatan psikologi sosial, pendekatan ini menjelaskan perilaku pemilih dalam konsep identifikasi partai. Konsepnya menjelaskan terkait persepsi pemilih atas partai yang ada atau ketertarikan emosional pemilih terhadap partai tertentu.

Berdasarkan pendapat diatas , perilaku pemilih tidak hanya memfokuskan pada satu pendekatan saja melainkan dengan berbagai pendekatan seperti sosiologis, psikologis maupun rasional. Selanjutnya dalam memilih model juga dapat dilihat orientasi “*policy-problem-solving*” dan orientasi ideoli, dimana keduanya dapat menghasilkan tinggi dan rendahnya suatu intensitas. Konfigurasi kedua tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Orientasi <i>policy-problem-solving</i>	Tinggi	Pemilih rasional	Pemilih kritis
	Pemilih skeptis	Pemilih skeptis	Pemilih tradisional

*Pertama pemilih rasional*, merupakan individu yang mempunyai ciri khas tidak terlalu mementingkan ideologi terhadap kandidat akan tetapi berfokus pada kemampuan calon kandidat dalam program kerja yang diusung.

*Kedua pemilih kritis*, merupakan panduan dari tingginya orientasi dan kemampuan kandidat dalam permasalahan daerahnya, tingginya orientasi individu terhadap ideologi. Pemilih seperti ini yang menjadikan nilai ideologis sebagai landasan untuk memilih dan menentukan pilihannya kemudian akan mengkritisi kebijakan pemerintah setelah menjabat.

*Ketiga pemilih tradisional*, pemilih tradisional mempunyai ideologi dan loyalitas yang sangat tinggi juga tidak terlalu melihat kebijakan calon kandidat sebagai sesuatu yang dipertimbangkan dalam mengambil keputusannya. Pemilih tradisional merupakan pemilih yang biasa dimobilisasi dalam periode kampanye.

*Keempat pemilih skeptis*, pemilih ini tidak memiliki ideologi yang cukup tinggi dengan calon kandidat dan tidak memfokuskan suatu kebijakan bukan sesuatu yang penting. Dari golongan ini akan memunculkan golongan putih (golput) dari ketidakinginan individu dalam memberikan hak suaranya. (Firmanzah, 2008)

## **2.3 Partisipasi Politik**

### **2.3.1 Pengertian Partisipasi Politik**

Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu *pars* dan *capere*. *Pars* artinya bagian sedangkan *capere* artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Dalam bahasa inggris, *partisipate* atau *participation* berarti mengambil peranan atau bagian. Sehingga partisipasi diartikan sebagai mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara.

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek yang penting bagi suatu demokrasi, dan merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Setiap warga negara berhak dan wajib untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan dan bernegara. Partisipasi warga negara dapat mencakup seluruh aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam kehidupan politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dijalankan oleh pemerintah menyangkut dan

mempengaruhi kehidupan warga negara, sehingga warga negara berhak ikut serta dalam kehidupan politik.

Dalam kehidupan politik Setiap warga negara berhak dan wajib untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan dan bernegara. Partisipasi warga negara dapat mencakup seluruh aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam kehidupan politik. Partisipasi warga negara tidak hanya berkaitan dengan pemilihan pimpinan negara saja, tetapi partisipasi warga negara tersebut juga mampu secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Lebih lanjut Budiardjo (2007) mendefinisikan bahwa “Partisipasi politik sebagai kegiatan individu atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara, dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya.”

Menurut Miriam Budiardjo (dalam Cholisim, 2007) menjelaskan bahwa partisipasi politik secara luas dapat diartikan sebagai suatu kegiatan individu maupun kelompok yang aktif dalam keikutsertaan dalam kehidupan politik, yaitu dengan cara memilih pemimpin Negara yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan publik (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, serta mengadakan hubungan (*contacting*) dengan anggota parlemen atau pejabat pemerintahan dan lainnya.

Oleh karena itu, partisipasi masyarakat di negara-negara demokrasi pada umumnya lebih banyak, maka dalam implementasinya tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami

masalah politik yang terjadi sehingga memiliki keinginan untuk melibatkan diri dalam kegiatan tersebut. Sebaliknya, apabila tingkat partisipasi warga negara rendah maka akan dianggap sebagai pertanda yang kurang baik, hal ini dapat diartikan bahwa banyak warga negara yang tidak tertarik dalam menaruh perhatiannya terhadap masalah kenegaraan.

Sementara Conway (dalam Widjanarko, 2004) mengatakan bahwa terminologi partisipasi politik memiliki makna sebagai upaya warga negara dalam mempengaruhi dan memilih struktur otoritas dan kebijakan pemerintah. Definisi ini menunjukkan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan langsung oleh warga negara.

Tidak jauh berbeda, Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (dalam Budiardjo, 2007) mengatakan :

*“By political participation we mean activity by private citizen designed to influence government decision making. Participation may be individual or collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective”*

Beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan adalah partisipasi politik bukan semata sikap-sikap, namun merupakan kegiatan-kegiatan yang bersifat empiris , merupakan kegiatan warga negara asli, bukan individu-individu yang bermain di wilayah pemerintahan. Pokok perhatiannya adalah kegiatan yang mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, dan kegiatan tersebut tidak memperdulikan berhasil atau tidaknya tujuan yang hendak dicapai, yaitu mempengaruhi keputusan dan tindakan pemerintah.

Herbert McClosky (Budiardjo, 2007) mengatakan, *“The term “political participation” will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rules and, directly or indirectly, in the formation of public policy”*. (Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian 11

dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum). Hal senada juga dijelaskan oleh Norman H. Nie dan Sidney Verba “*By political participation we refer to those legal activities by private citizens which are more or less directly aimed at influencing the selection of governmental personnel and/or the actions they take*”

Sementara itu, Dalton (Priambodo, 2000) mengatakan “*We can organize potential of participation into three grouping : personal characteristics, group effects, and political attitudes*”. Ini menunjukkan adanya keterkaitan partisipasi politik dengan karakteristik personal, pengaruh kelompok, dan sikap politik. Sedangkan Fauls (Damsar, 2012) memberikan batasan partisipasi politik sebagai keterlibatan secara aktif (*the active engagement*) dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan. Keterlibatan ini mencakup keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan maupun berlaku oposisi terhadap pemerintah.

Dari definisi-definisi tersebut, peneliti kemudian menariknya ke dalam pengertian yang lebih sempit, yaitu partisipasi politik pada mahasiswa. Ini seperti halnya yang dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya yang juga dilakukan pada lingkup mahasiswa. Peneliti kemudian menarik kesimpulan bahwa partisipasi politik pada mahasiswa adalah suatu kegiatan suka rela individu ataupun kelompok mahasiswa, baik langsung maupun tidak langsung, untuk aktif dalam kehidupan politik yang bertujuan mempengaruhi kebijakan pemerintahan, pembentukan kebijakan umum, dan semua bentuk aktivitas yang dimaksud mempengaruhi pemerintah.

Kegiatan tersebut adalah pemberian suara dalam pemilu, keikutsertaan dalam kampanye politik, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah, dan kritik terhadap kebijakannya. Selanjutnya pengertian inilah yang digunakan dalam penelitian ini.

### 2.3.2 Bentuk Partisipasi Politik

Conway (Widjanarko, 2004) mengklasifikasikan bentuk partisipasi politik dalam dua jenis, yakni konvensional dan non-konvensional. Partisipasi yang bersifat konvensional mengarah pada aktivitas yang diterima sebagai sesuatu yang sesuai dengan budaya politik yang dominan. Sebaliknya, partisipasi politik non-konvensional mengarah pada aktivitas yang tidak diterima dalam budaya politik dominan.

Berbeda dengan Conway, Huntington dan Nelson (Priambodo, 2000) membedakan bentuk-bentuk partisipasi politik dalam kategori sebagai berikut:

1. *Electoral Activity*, yaitu segala bentuk kegiatan yang secara langsung atau pun tidak langsung berkaitan dengan pemilu. Electoral Activity ini juga mencakup pemberian suara, sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan umum.
2. *Lobbying*, yaitu tindakan dari individu atau pun sekelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintah atau pun tokoh politik dengan tujuan untuk mempengaruhi pejabat atau pun tokoh politik tersebut terkait masalah yang mempengaruhi kehidupan mereka.
3. *Organizational activity*, yaitu keterlibatan warga masyarakat ke dalam berbagai organisasi sosial dan politik.
4. *Contacting*, yaitu partisipasi yang dilakukan oleh warga negara dengan cara langsung misalnya melakukan komunikasi untuk membangun jaringan kerjasama.
5. *Violence*, yaitu cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah. Penggunaan kekerasan mencerminkan motivasi-motivasi partisipasi yang cukup kuat. Kekerasan dapat ditujukan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah (huru-hara, pemberontakan) atau mengubah seluruh sistem politik dengan cara revolusi.

Sementara itu, Verba et al (Priambodo, 2000) menemukan bahwa individu-individu cenderung memilih bentuk-bentuk partisipasi politik yang dilakukan secara tetap sesuai motivasi dan tujuan, tidak berubah-ubah seperti diasumsikan banyak analist. Bentuk-bentuk partisipasi yang sejenis membentuk kelompok (cluster) bersama. Pengelompokan tersebut kemudian dimodifikasi oleh Dalton (2009) sebagai berikut:

1. *Voting*, yaitu bentuk-bentuk partisipasi politik yang terkait dengan pemilihan (voting/electing). Voting adalah bentuk yang paling sederhana untuk mengukur partisipasi.
2. *Campaign activity*, yaitu aktivitas kampanye yang mewakili bentuk- bentuk partisipasi yang merupakan perluasan dari pemilihan (extension of electoral participation). Termasuk di dalamnya bekerja untuk partai atau seorang kandidat, menghadiri pertemuan-pertemuan kampanye, melakukan persuasi terhadap orang lain untuk memilih, dan segala bentuk aktivitas selama dan antara pemilihan.
3. *Communal activity*, Bentuk-bentuk partisipasi ini berbeda dengan aktivitas kampanye karena aktivitas komunal mengambil tempat di luar setting pemilihan (out side the electoral setting). Termasuk keterlibatan dalam kelompok-kelompok masyarakat yang interest dan concern dengan kebijakan umum seperti kelompok studi lingkungan, kelompok wanita, atau proteksi terhadap konsumen.
4. *Contacting personal on personal matters*, Bentuk partisipasi ini berupa individu melakukan kontak terhadap individu berkait dengan suatu materi tertentu yang melekat pada orang tersebut. diperlukan inisiatif dan informasi yang tinggi berkait isu yang spesifik, dalam kontak yang bersifat perseorangan ini. Bentuk partisipasi ini seringkali digunakan untuk membangun pengertian, kepercayaan, mencari koneksi, atau pun membangun jaringan.
5. *Protest*, yaitu bentuk-bentuk partisipasi yang unconventional seperti demonstrasi dan gerakan protes. Walaupun individu-individu yang memilih bentuk partisipasi ini sering berada di luar jalur/saluran yang normal, namun mereka seringkali menjadi bagian penting dalam proses demokratisasi.

### 2.3.3 Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Salah satu faktor yang turut berpengaruh dalam partisipasi politik adalah sosialisasi politik. Menurut Rush dan Althoff (dalam Budiardjo, 2008), “sosialisasi politik merupakan suatu proses dengan mana individu-individu dapat memperoleh pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap terhadap sistem politik masyarakatnya.” Pengetahuan yang di peroleh oleh individu sangat penting dalam membentuk tindakan individu (over behavior).

Rush dan Althof (dalam Budiardjo, 2007) mensugestikan bahwa partisipasi politik itu bervariasi berkaitan dengan empat faktor utama, yaitu :

1. Sejauh mana orang menerima perangsang politik  
Dengan penerimaan perangsang politik yang mana didapat melalui media massa maupun organisasi bahkan informasi antar individu, hal ini akan memberikan dampak atau pengaruh dalam keikutsertaan individu dalam kegiatan politik.
2. Karakteristik pribadi individu  
Karakteristik pribadi individu seperti sifat dan karakter yang demokratis, hal sangat berpengaruh dalam partisipasi politik
3. Karakteristik sosial individu  
Karakteristik sosial individu seperti status ekonomi, usia, suku, jenis kelamin dan agama, faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap keterlibatan individu terhadap partisipasi politik.
4. Keadaan politik atau lingkungan politik di mana individu, dapat menemukan dirinya sendiri.

Sejalan dengan hal tersebut, Weiner (dalam Budiardjo, 2007) mengemukakan bahwa partisipasi politik dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni:

1. Modernisasi  
Modernisasi disegala aspek akan berimplikasi pada industrial, komensialisme pertanian, meningkatkan arus urbanisasi, perbaikan pendidikan dalam hal ini meningkatkan baca tulis, peningkatan media masa atau media komunikasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi infoemasi secara luas.

2. Terjadinya perubahan-perubahan struktur kelas sosial  
Perubahan struktur kelas terjadi akibat dari terciptanya kelas menengah dan para pekerja uang baru saja meluas di era industrialisasi dan modernisasi.
3. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa modern  
Sejalan dengan kaum intelektual serta meningkatnya komunikasi maka terciptanya gagasan-gagasan baru seperti nasionalisme, liberalisme serta mengakibatkan tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan suara.
4. Konflik para pemimpin politik  
Kekuasaan yang sering diperebutkan oleh pemimpin politik biasanya untuk mencapai titik kemenangan dilakukan dengan cara mencari suara atau dukungan massa.
5. Keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan.  
Pemerintah dalam ruang lingkup ini seringkali membangkitkan tuntutan-tuntutan organisasi baik dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik.

Sementara itu menurut Milbrath yang dikutip oleh Michael Rush dan Althof mengemukakan bermacam alasan mengenai partisipasi seseorang. *Pertama* berkaitan dengan penerimaan perangsang politik, kepekaan dan keterlibatan individu terhadap perangsangan politik melalui organisasi maupun media massa dapat memberikan pengaruh bagi keikutsertaan individu dalam kegiatan politik.

*Kedua*, berkaitan dengan karakteristik sosial individu. Terdapat beberapa faktor bahwa karakter seseorang dapat mempengaruhi keterlibatan partisipasi politik yaitu berdasarkan status ekonomi, agama, suku, usia dan jenis kelamin.

*Ketiga*, sistem partai di lingkungan individu hidup. Partai-partai politik di dalam negara demokrasi ini biasanya cenderung mencari dukungan massa di lingkungan sekitarnya dan memperjuangkan kepentingan massa. Karena kepentingan massa di perjuangkan maka massa akan berpartisipasi dalam politik tersebut.

*Keempat*, adanya perbedaan regional. Perbedaan ini adalah aspek lingkungan yang mempengaruhi perbedaan watak dan tingkah laku individu, dengan demikian perbedaan regional ini dapat mendorong perbedaan perilaku politik dan partisipasi politik.

Berdasarkan pendapat para ahli terdahulu bahwa partisipasi politik individu dipengaruhi oleh dua faktor, yakni dari dalam diri dan faktor dari luar diri. Faktor dari dalam diri dipengaruhi oleh pengetahuan individu, karakter pribadi individu dan sikapnya (respon) terhadap rangsangan politik sedangkan faktor dari luarnya dipengaruhi oleh karakteristik sosial, kondisi politik, modernisasi, perubahan struktur sosial, pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa, serta keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

### **2.3.4 Tipologi Partisipasi Politik**

A. Rahman H.I (2007) menyatakan bahwa secara umum ada tiga tipologi partisipasi sebagai berikut:

1. Partisipasi aktif

Partisipasi aktif merupakan partisipasi yang berorientasi terhadap proses input dan output

2. Partisipasi pasif

Partisipasi pasif adalah partisipasi yang hanya berfokus kepada output, yang mana dalam hal ini hanya berfokus pada peraturan pemerintah yaitu menerima dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah.

3. Golongan putih (Golput)

Golongan ini biasa disebut juga dengan kelompok apatis, golongan ini

menganggap bahwa sistem politik yang ada menyimpang dari tujuan yang di janjikan.

Berikutnya Milbrath dan Goel yang dikutip oleh Cholisin (2007) mengelompokkan partisipasi politik menjadi beberapa bagian yaitu:

1. Partisipasi politik apatis, yaitu seorang yang tidak ingin berpartisipasi dan berkontribusi dalam proses politik.
2. Partisipasi politik spectator, ialah seorang yang setidaknya-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum.
3. Partisipasi politik gladiator, yakni seseorang yang terlibat aktif dalam proses politik seperti spesialis yang mengadakan pertemuan, aktivis partai, tim kampanye dan aktivis masyarakat.
4. Partisipasi politik pengkritik, ialah individu-individu yang berpartisipasi dalam jenis yang tidak konvensional.

Menurut Gany (2007:1) partisipasi politik terbagi menjadi dua bagian yaitu :

1. Konvensional, merupakan pemberian suara (*voting*), diskusi politik, kampanye, membentuk serta terlibat langsung dalam kelompok kepentingan serta komunikasi individu dengan pejabat politik atau administrasi.
2. Nonkonvensional, merupakan bentuk demonstrasi seperti unjuk rasa, tindak kekerasan politik mengenai harta benda, perusakan, pemboman, pembakaran, tindak kekerasan politik terhadap manusia, penculikan dan pembunuhan.

Sementara Olsen yang dikutip oleh A. Rahman H.I (2007:289) memiliki pandangan bahwa partisipasi merupakan **dimensi** utama startifikasi sosial.

Menurutnya partisipasi dibagi menjadi enam lapisan yaitu

1. pemimpin politik, aktivitas politik,
2. seseorang yang menerima dan menyampaikan gagasan-gagasan kepada massa (komunikator),
3. warga masyarakat,

4. kelompok marginal (orang yang sedikit melakukan kontak dengan sistem politik)

5. kelompok terisolasi (orang yang jarang melakukan partisipasi politik)

Selanjutnya menurut Huntington dan Nelson (Damsar, 2012) bentuk-bentuk partisipasi politik meliputi :

1. Kegiatan Pemilihan, kegiatan ini bertujuan untuk mempengaruhi hasil proses pemilihan seperti dana kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi para calon.
2. *Lobbying*, merupakan kegiatan yang mencakup upaya-upaya perseorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang. Seperti kegiatan yang ditujukan untuk menimbulkan dukungan bagi atau oposisi terhadap suatu usul legislatif atau keputusan administratif tertentu.
3. Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya utama dan eksplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
4. Mencari koneksi (*contacting*) adalah tindakan perseorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya bertujuan untuk memperoleh manfaat bagi satu orang atau segelintir orang
5. Tindak kekerasan (*violence*) merupakan satu bentuk partisipasi politik yang ditujukan untuk keperluan analisis dimana manfaatnya untuk upaya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap harta benda maupun individu.

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa orientasi partisipasi politik aktif ada pada input dan output politik, sedangkan partisipasi pasif hanya berfokus pada outputnya saja. Selanjutnya ada yang menjurus ke dalam partisipasi politik yang apatis, yaitu anggapan masyarakat terhadap sistem politik yang dinilai menyimpang dari tujuan yang diinginkan.

### **2.3.5 Fungsi dan Tujuan Partisipasi Politik**

Budiardjo (2008) menyatakan bahwa partisipasi politik bertujuan untuk mempengaruhi proses-proses politik dalam penentuan pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Partisipasi politik harus benar-benar dilakukan oleh masyarakat agar kebijakan yang diambil pemerintah lebih berpihak dan memperhatikan kepentingan masyarakat. Melalui partisipasi politik diharapkan mampu membangun suatu sistem politik yang stabil dan menciptakan suatu kehidupan negara yang lebih baik.

Di samping itu, Robert Lane (Rush dan Althof, 2008) dalam studinya mengenai keterlibatan politik, mempersoalkan bahwa partisipasi politik memenuhi empat macam fungsi, yakni :

- 1) Partisipasi politik masyarakat untuk mendukung program-program pemerintah;
- 2) Partisipasi politik masyarakat berfungsi sebagai organisasi yang menyuarakan kepentingan masyarakat untuk masukan bagi pemerintah dalam mengarahkan dan meningkatkan pembangunan;
- 3) Kontrol terhadap pemerintah dalam pelaksanaan kebijakannya.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi partisipasi politik pada dasarnya adalah sebagai media untuk menyuarakan aspirasi masyarakat demi mengarahkan dan mengontrol kebijakan pemerintah agar arah pembangunan negara lebih berpusat pada aspirasi dan kepentingan masyarakat demi mewujudkan kehidupan politik negara yang kuat dan dinamis serta sebagai suatu media untuk mengembangkan sistem politik agar mekanisme politik itu hidup dan berjalan sesuai dengan prosesnya.

### **2.4 Bentuk Perilaku *Non-Voting***

Non-Voting dalam perpolitikan Indonesia biasa disebut dengan istilah golongan putih (golput). Golongan ini secara rinci muncul di karenakan adanya ketidakpuasan terhadap pelaksanaan pemilu. Golput berdasarkan hakekatnya

dibagi menjadi dua jenis yaitu golput ideologis dan golput administratif. Pemilih yang secara sadar sengaja tidak ingin memilih sebab alasan-alasan politis disebut golput ideologis, sedangkan pemilih yang tidak terdata atau suara tidak sah disebut golput administratif.

Golongan ini timbul akibat ketidakpuasan terhadap pelaksanaan pemilu Orde Baru. Golput pada hakikatnya terdiri dari dua macam yaitu golput ideologis dan golput pragmatis/administratif. Golput ideologis adalah pemilih yang sengaja tidak memilih karena alasan-alasan politis, sedangkan golput pragmatis/administratif lebih karena tidak terdaftar sebagai pemilih atau suara tidak sah.

Beberapa ilmuwan mendefinisikan golput, yang pertama yaitu menurut Irwan H, Dulay dia mengatakan golongan putih diakronimkan menjadi golput adalah sekelompok masyarakat yang lalai dan tidak bersedia memberikan hak pilihnya dalam pemilihan dengan berbagai macam alasan, baik pada pemilihan legislatif, pilpres, pilkada maupun pemilihan kepala desa. Golput disebut juga dengan abstain atau blanko pada pemilihan terbatas pada suatu lembaga organisasi atau perusahaan.

Menurut Susan Weich, ketidakhadiran seseorang dalam pemilu berkaitan dengan kepuasan atau ketidakpuasan pemilih. Kalau seseorang memperoleh kepuasan dengan tidak menghadiri pemilu tentu ia akan tidak hadir ke bilik suara, begitu pula sebaliknya. Disamping itu, ketidakhadiran juga berkaitan dengan kalkulasi untung rugi. Kalau seseorang merasa lebih beruntung secara financial dengan tidak hadir dalam pemilu, tentu ia akan lebih suka melakukan pekerjaan lain yang lebih menguntungkan. Sehingga garis besar non voting atau golput adalah tindakan tidak memberikan hak pilih dalam proses pemilihan baik dengan sengaja mau tidak sengaja. Jika melihat jumlah kehadiran pemilih pada pemilu masa Orde Baru rata-rata di atas 90%. Angka ini hanya dijumpai pada negara-negara komunis yang menerapkan hukum wajib coblos seperti pecahan Uni Soviet, Albania, Bulgaria, Polandia, Rumania, Cekoslawakia, Guinea, dan sebagainya. Di negara-negara ini jumlah kehadiran pemilih mendekati 100%.

Sementara di negara-negara dunia ketiga, rata-rata kehadiran pemilih sangat rendah seperti halnya di negara Kuwait, Amerika Selatan, Malawi dan Bahrain yang angka kehadiran pemilihnya di bawah 20%. Dalam suatu negara yang menerapkan hukum wajib coblos, seseorang akan memperoleh sanksi atau denda jika tidak menghadiri pemilu. Padahal dalam realitanya, tidak semua pemilih menyukai partai atau kandidat yang sedang bertarung dalam pemilu. Akibatnya mereka harus mendatangi tempat pemungutan suara untuk kepala daerah menghindari sanksi atau denda, namun tidak mencoblos kartu suara atau bahkan merusaknya.

Perilaku non-voting di Indonesia tidak jauh berbeda dengan fenomena di atas. Perilaku non-voting dimanifestasikan dalam berbagai bentuk yaitu: Pertama, orang yang tidak menghadiri tempat pemungutan suara sebagai aksi protes terhadap pelaksanaan pemilu dan sistem politik yang ada. Kedua, orang yang menghadiri tempat pemungutan suara namun tidak menggunakan hak pilihnya secara benar dengan menusuk lebih dari satu tanda gambar. Ketiga, orang yang menggunakan hak pilihnya dengan jalan menusuk bagian putih dari kartu suara. Dalam konteks semacam ini perilaku non voting adalah refleksi protes atas ketidakpuasan terhadap sistem politik yang sedang berjalan. Keempat, orang yang tidak hadir di tempat pemungutan suara dikarenakan mereka memang tidak terdaftar sehingga tidak memiliki hak suara.

Kekhawatiran terhadap rendahnya kehadiran pemilih dalam pemilu ditenggarai oleh beberapa hal. Pertama, kehadiran pemilih seringkali ditafsirkan sebagai bentuk loyalitas atau kepercayaan pada sistem politik yang ada, sehingga ketidakhadiran diinterpretasikan sebagai bentuk ketidakpercayaan kepada sistem politik atau rezim yang sedang berjalan. Kedua, adanya kecenderungan naiknya angka ketidakhadiran memilih di beberapa negara dalam beberapa dekade terakhir ini.

Negara Indonesia sendiri ketidakhadiran pemilih dalam pemilu-pemilu pasca reformasi politik juga mengalami kenaikan yang signifikan. Pada tingkat nasional,

pemilu pertama sejak reformasi politik yaitu pemilu 1999 angka golput hanya berkisar 10%, pemilu 2004 angka golput mencapai 28,34% atau naik hampir tiga kali lipat atau 300%. Sementara pada pemilu 2009 angka golput menjadi 29,01%. Pengertian golput yang lebih rinci dikemukakan oleh M. Asfar (2007) yaitu orang yang tidak menghadiri tempat pemungutan suara sebagai aksi protes terhadap pelaksanaan pemilu atau sistem politik yang ada; orang yang menghadiri tempat pemungutan suara namun tidak menggunakan hak pilihnya secara benar, seperti menusuk lebih dari satu gambar, orang yang menggunakan hak pilihnya tetapi menusuk pada bagian putih dari kartu suara dan orang yang tidak menggunakan hak suara karena tidak adanya motivasi untuk memilih.

David Moon menjelaskan bahwa terdapat dua pendekatan untuk menjelaskan Perilaku Tidak Memilih (non-voting behavior) dalam suatu pemilu. Pertama, menekankan pada karakter sosial dan psikologi pemilih serta karakteristik institusional sistem pemilu. Sementara pendekatan kedua menekankan harapan pemilih tentang keuntungan dan kerugian atas keputusan mereka untuk hadir atau tidak hadir memilih. Menurut kedua pendekatan tersebut, setidaknya ada empat faktor yang mempengaruhi seseorang untuk tidak memilih yaitu sebagai berikut.

#### **2.4.1 Faktor Psikologis**

Penjelasan non-voting Behavior dari faktor psikologi pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam dua kategori. Pertama, berkaitan dengan ciri-ciri kepribadian seseorang. Kedua, berkaitan dengan orientasi kepribadian. Penjelasan pertama melihat bahwa perilaku non-voting disebabkan oleh kepribadian yang tidak toleran, otoriter, tak acuh, perasaan tidak aman, perasaan khawatir, kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi, dan semacamnya. Orang yang mempunyai kepribadian yang tidak toleran atau tak acuh cenderung untuk tidak memilih, sebab apa yang diperjuangkan kandidat atau partai politik tidak selalu sejalan dengan kepentingan perorangan secara langsung, betapapun mungkin hal itu menyangkut kepentingan umum yang lebih luas.

Dalam konteks semacam ini, para pemilih yang mempunyai kepribadian tidak toleran atau tak acuh cenderung menarik diri dari percaturan politik langsung dikarenakan tidak berhubungan dengan kepentingannya. Sementara itu, penjelasan kedua lebih menitik-beratkan faktor orientasi kepribadian. Penjelasan kedua ini melihat bahwa perilaku non-voting disebabkan oleh orientasi kepribadian pemilih, yang secara konseptual menunjukkan karakteristik apatis, anomie, dan alienasi.

Secara teoritis, perasaan apatis sebenarnya merupakan jelmaan atau pengembangan lebih jauh dari kepribadian otoriter, yang secara sederhana ditandai dengan tiadanya minat terhadap persoalan-persoalan politik. Hal ini bisa disebabkan oleh rendahnya sosialisasi atau rangsangan (stimulus) politik, atau adanya perasaan (anggapan) bahwa aktifitas politik tidak menyebabkan perasaan kepuasan atau hasil secara langsung. Anomie merujuk pada perasaan tidak berguna. Mereka melihat bahwa aktifitas politik sebagai sesuatu yang sia-sia, karena mereka merasa tidak mungkin mampu mempengaruhi peristiwa atau kebijaksanaan politik. Bagi para pemilih semacam ini, memilih atau tidak memilih tidak mempunyai pengaruh apa-apa, karena keputusan-keputusan politik seringkali berada di luar kontrol para pemilih yang mana orang yang akhirnya terpilih biasanya menggunakan logika-logikanya sendiri dalam mengambil berbagai keputusan politik, dan dalam banyak hal mereka jauh berada di luar jangkauan para pemilih. Perasaan powerlessness (Ketidakberdaya) inilah yang disebut sebagai anomie.

Berbeda dengan powerlessness (Ketidakberdaya), alienasi berada di luar apatis dan anomie. Alienasi merupakan perasaan keterasingan secara aktif. Seseorang merasa dirinya tidak terlibat dalam banyak urusan politik. Pemerintah dianggap tidak mempunyai pengaruh terutama pengaruh baik terhadap kehidupan seseorang. Bahkan pemerintah dianggap sebagai sesuatu yang mempunyai konsekuensi jahat terhadap kehidupan manusia. Jika perasaan alienasi ini memuncak, mungkin akan mengambil bentuk

alternatif aksi politik, seperti melalui kerusuhan, kekacauan, demonstrasi dan sebagainya.

#### **2.4.2 Sistem Politik**

Secara teoritis belum ada kesepakatan yang pasti adanya hubungan antara demokratis tidaknya sistem politik dengan kuantitas kehadiran atau ketidakhadiran pemilih dalam suatu pemilu. Kenyataan menunjukkan kehadiran dan ketidakhadiran dalam pemilu tidak secara jelas menunjukkan adanya hubungan kedua variabel tersebut. Misalnya di Amerika Serikat sebagai negara yang disebut kampiun demokrasi, jumlah kehadiran pemilih dalam pemilu tergolong rendah, rata-rata hanya 50% saja. Sebaliknya di negara-negara Eropa Barat seperti Italia, Denmark, Belgia, Austria, Jerman dan sebagainya, yang tingkat demokrasinya cukup baik, tingkat kehadiran pemilih mencapai 90%

Salah satu hasil penelitian yang menunjukkan hubungan antara sistem politik dengan tingkat kehadiran pemilih adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Tingsten. Hasil studi Tingsten menyimpulkan bahwa di negara-negara yang menerapkan sistem pemilu atau sistem perwakilan berimbang (proporsional) seperti negara-negara Eropa Barat, rata-rata partisipasi pemilih cukup tinggi. Sementara negara-negara yang menerapkan sistem distrik, jumlah kehadiran pemilih relatif rendah. Hal ini dikarenakan, dalam sistem perwakilan berimbang, perolehan kursi sangat tergantung pada proporsi jumlah suara pemilih. Sementara itu, dalam sistem distrik perolehan kursi sangat ditentukan oleh mayoritas suara yang diperoleh. Sehingga para pemilih yang menerapkan sistem proporsional mempunyai semangat yang lebih besar untuk memilih betapapun mereka menyadari partai atau kandidat yang dipilihnya akan kalah di wilayahnya, sebab suaranya tidak hilang karena digabungkan dengan perolehan suara di daerah pemilihan lainnya. Pandangan Tingsten ini barangkali dapat menjelaskan fenomena tingginya angka partisipasi politik dalam pemilu di negaranegara Eropa Barat. Dengan faktor sistem yang lebih menitik beratkan pada

penyelenggara negara menjadi aspek utama yang mempengaruhi jumlah tidak memilih pada sistem pemilihan yang digunakan pada suatu negara.

### **2.3.3 Kepercayaan Politik**

Dalam konteks non-voting behavior, kepercayaan pada sistem politik yang ada dapat mempengaruhi tingginya angka ketidakhadiran pemilih. Konsep kepercayaan politik digunakan untuk menjelaskan keaktifan dan ketidakaktifan (inactivity) seseorang dalam dunia politik. Ketidakaktifan dalam konsep ketidakpercayaan politik sendiri selalu mengandung pengertian ganda. Pertama, ketidakaktifan dapat diinterpretasikan sebagai ekspresi atas kepercayaan yang rendah terhadap sistem politik atau sebagai ekspresi atas perasaan keterasingan (alienasi). Kediktatoran militer di masa Yunani misalnya, sulit untuk menghasilkan persentase pilihan “ya” yang cukup tinggi dalam suatu pemungutan suara konstitusi (plebisit konstitusional) yang diharapkan.

Pada sisi lain, ketidakaktifan juga dapat diinterpretasikan sebagai ekspresi kepercayaan yang tinggi, dimana ketidakaktifan seseorang dalam bilik suara menandakan bahwa mereka puas terhadap sistem politik yang ada, atau tidak khawatir dengan keadaan politik yang ada. Mereka baru aktif atau berpartisipasi apabila mereka benar-benar kecewa terhadap sistem politik atau keadaan yang ada.

Penelitian A. Gamson mencoba menjelaskan bahwa kepercayaan pada sistem politik yang ada dapat mempengaruhi tingginya angka ketidakhadiran pemilih. Misalnya, ada bukti kuat bahwa partisipasi dalam sistem politik meningkat pada saat terjadi krisis. Dengan begitu, ketidakaktifan seseorang menandakan bahwa mereka puas terhadap sistem politik yang ada, atau paling tidak khawatir terhadap keadaan yang ada. Mereka baru aktif atau berpartisipasi apabila mereka benar-benar kecewa terhadap sistem politik atau keadaan yang ada. Dalam kondisi demikian,

ketidakaktifan merupakan suatu pertanda keyakinan atau kepercayaan terhadap sistem politik yang ada.

Kepercayaan politik juga berhubungan dengan penilaian seseorang terhadap kinerja dan performance pemerintah. Apakah seseorang menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak, baik dalam pembuatan kebijakan maupun dalam pelaksanaan pemerintahan dalam suatu sistem politik.

#### **2.3.4 Latar Belakang Sosial Ekonomi**

Setidaknya ada tiga indikator yang biasa digunakan untuk menjelaskan status sosial ekonomi yaitu tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan pekerjaan. Wolfinger seperti yang dijelaskan M. Asfar (2007 ) menyimpulkan bahwa ada beberapa alasan mengapa tingkat status sosial ekonomi berkorelasi dengan kehadiran atau ketidakhadiran pemilih.

Pertama, tingkat pendidikan tinggi menciptakan kemampuan lebih besar untuk mempelajari kehidupan politik tanpa rasa takut, disamping memungkinkan seseorang menguasai aspek-aspek birokrasi, baik pada saat pendaftaran maupun pemilihan. Kedua, pekerjaan-pekerjaan tertentu lebih menghargai partisipasi warga. Para pemilih yang bekerja di lembaga-lembaga atau sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah cenderung lebih tinggi tingkat kehadirannya dalam pemilu dibandingkan para pemilih yang bekerja pada lembaga-lembaga atau sektor-sektor yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan kebijakan pemerintah. Para pegawai negeri atau pensiunan misalnya, menunjukkan tingkat kehadiran memilih lebih tinggi dibanding yang lain. Sebab para pegawai negeri ini sering terkena langsung dengan kebijakan pemerintah seperti kenaikan gaji, pemutusan hubungan kerja dan lain sebagainya. Ketiga, pendapatan yang tinggi memudahkan orang untuk menanggung beban finansial akibat keterlibatannya dalam proses pemilu.

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat kehadiran selalu menunjukkan arah yang berlawanan. Pemilih yang tingkat pendidikannya rendah cenderung menunjukkan angka ketidakhadiran dalam pemilu yang cukup tinggi. Sebaliknya, pemilih yang berpendidikan tinggi cenderung angka ketidakhadirannya dalam pemilu rendah. Sementara itu hubungan antara tingkat pendapatan dengan tingkat ketidakhadiran juga menunjukkan pola yang sama. Para pemilih yang tingkat pendapatannya rendah cenderung menunjukkan angka ketidakhadiran dalam pemilu cukup tinggi. Sebaliknya, para pemilih dengan latar belakang pendapatan tinggi cenderung angka ketidakhadirannya dalam pemilu rendah. Tetapi beberapa kasus menunjukkan bahwa yang mempunyai “status menyilang” justru cenderung tidak memilih. Misalnya, seorang pemilih yang tingkat pendidikannya tinggi dan pendapatannya rendah, seorang pemilih yang berlatar belakang Islam-santri dari keluarga PPP namun bekerja sebagai PNS dan sebagainya.

Pendapat yang cukup sederhana dalam menjelaskan faktor-faktor penyebab seseorang yang mempunyai hak pilih tidak ikut dalam pemilu disampaikan oleh Mc Closky. Hal ini secara detail dijelaskan oleh Miriam Budiardjo sebagai berikut: pertama, bersikap acuh tak acuh dan tidak tertarik oleh, atau kurang paham mengenai masalah politik; kedua, karena tidak yakin bahwa usaha untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah tidak akan berhasil; dan yang terakhir, sengaja tidak memanfaatkan kesempatan memilih karena kebetulan berada dalam lingkungan dimana ketidakikutsertaan merupakan hal yang terpuji.

## **2.5 Kerangka Fikir**

Pada Kabupaten Lampung Selatan banyak ditemukannya perilaku tidak memilih terutama pada kecamatan Sragi. Dimana Kecamatan Sragi memiliki jumlah daftar pemilih tetap tertinggi yaitu 25.792 dengan persentase perilaku non voting sebesar 25,29%. Melihat dari partisipasi pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Selatan terutama di kecamatan Sragi yang rendah maka Komisi Pemilihan Umum

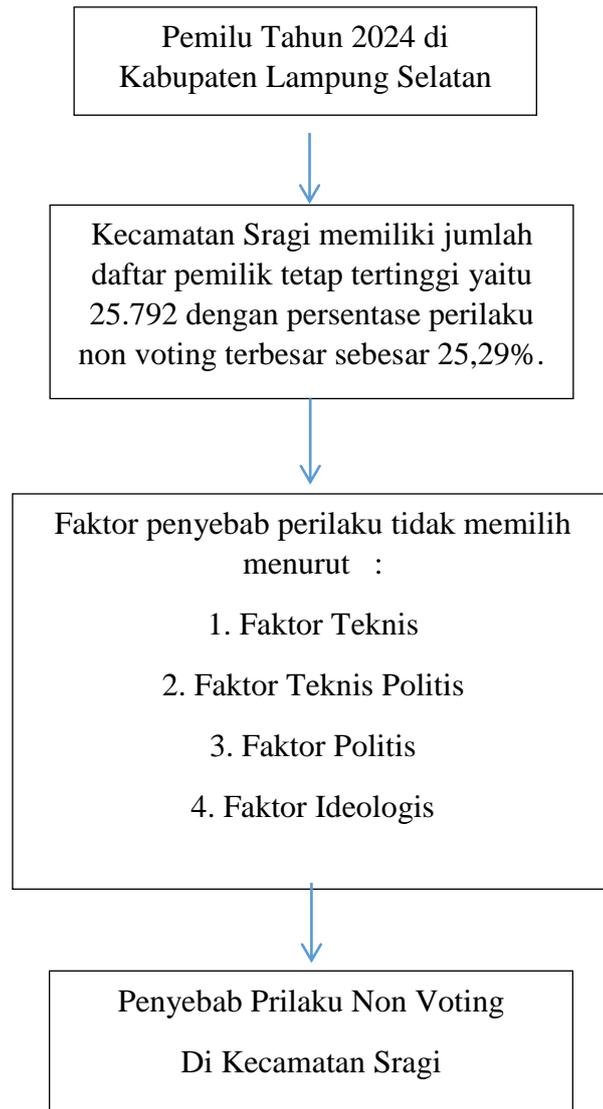
melakukan analisis penyebab perilaku non voting (perilaku tidak memilih) tersebut sehingga pada Pemilu Tahun 2024 partisipasi masyarakat Kabupaten Lampung Selatan meningkat.

Perilaku tidak memilih atau perilaku *Non Voting* dapat disebut juga sebagai Golput, perilaku tersebut adalah dimana seseorang atau individu tidak menggunakan hak pilihnya dalam sebuah pemilihan. Perilaku tidak memilih disebabkan oleh keinginan diri sendiri bahwa tidak ingin memilih atau dapat disebabkan oleh halangan lainnya. Eef Saifulloh Fatah dalam Pahmi Sy (2010:68-69) dalam (Suwondo & Darmawan Purba, 2017) menyebutkan beberapa faktor penyebab terjadinya golput, antara lain:

1. Faktor teknis, tidak memilih karena situasi dan kondisi yang mendesak seperti adanya keluarga wafat, ketiduran, kelelahan, sakit, karena harus bekerja, dan lain-lainnya.
2. Faktor teknis politis, seperti tidak mendapat undangan karena tidak terdaftar sebagai pemilih (tidak masuk dalam daftar pemilih tetap) atau disengaja tidak diberikan undangan oleh pihak panitia walaupun sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap.
3. Faktor politis, yaitu adanya perasaan dari mereka yang merasa tidak punya pilihan dari kandidat atau partai yang tersedia, mereka tidak percaya pemilu dan pilihan mereka membawa perubahan terhadap kehidupan mereka.
4. Faktor ideologis, masyarakat tidak percaya pada mekanisme demokrasi yang dianggap liberal, juga pada lembaga pemerintah selaku penyelenggara, untuk itu mereka tidak mau terlibat di dalamnya.

Berdasarkan penjelasan tinjauan diatas atau landasan teori di atas, maka dapat disusun kerangka pikir sebagai berikut :

Gambar 1. Kerangka Pikir



Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2024.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini berjudul Analisis Kecenderungan Dan Penyebab Prilaku Non Voting Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 (Studi di Kecamatan Sragi Lampung Selatan). Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu metode untuk mengkaji tentang fenomena, masalah-masalah, dan kemanusiaan terhadap sekelompok orang atau individu tertentu. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Fadli, 2021).

Penelitian kualitatif juga didefinisikan sebagai jenis penilaian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik kontekstual melalui pengumpulan data dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci (Fatonah, 2020). Burhan Bungin dalam Ibrahim (2015:52) juga mendefinisikan pendekatan kualitatif adalah proses kerja penelitian yang sarannya terbatas, namun kedalaman datanya tak terbatas, semakin dalam dan berkualitas data yang diperoleh atau dikumpulkan maka semakin berkualitas hasil penelitian tersebut.

### **3.2 Fokus Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (Rukin, 2019). Penelitian ini memfokuskan pada Analisis Kecenderungan Dan Penyebab Prilaku Non Voting Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 (Studi di Kecamatan Sragi Lampung Selatan) . dengan beberapa indikator yang dikemukakan oleh R. Holsti yaitu: Objektif, sistematis, dan generalis agar terciptanya tujuan peneliti mengenai pilkada yang dilaksanakan di kabupaten lampung selatan.

#### **1. Objektif**

Pengertian objektif di sini memiliki arti sesuai peraturan atau juga prosedur yang jika dilakukan oleh seorang peneliti lain akan mendapatkan kesimpulan yang serupa dengan peneliti yang lain.

Hal ini harus mencakup tiga elemen yakni tujuan secara keseluruhan yang menguraikan posisi yang ingin kita capai secara keseluruhan dan kerangka waktu (kurun waktu) dimana keseluruhan tujuan harus dicapai.

#### **2. Sistematis**

Sistematis memiliki arti penetapan isi atau kategori dilakukan menurut aturan yang diterapkan secara konsisten, meliputi penjaminan seleksi dan pengkoding-an sebuah data agar tidak bias atau samar-samar.

#### **3. Generalis**

Generalis berarti penemuan harus mempunyai suatu referensi yang teoritis. Analisis konten atau isi merupakan teknik yang berorientasikan kepada penelitian kualitatif, ukuran kebakuannya diterapkan pada satuansatuan tertentu yang biasanya dipakai untuk menentukan karakter dokumen-dokumen atau membandingkannya

### **3.3 Informan**

Informan pada sebuah penelitian, dapat diartikan sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Sehingga, informan tersebut harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian dan harus sukarela menjadi anggota tim penelitian

walaupun hanya bersifat informal (Nugrahani, 2014). Selain itu, dalam memahami kancah penelitian yang lebih aman, peneliti harus berpikir untuk menemukan sumber data atau informan yang tepat (*key informan*). Selain itu peneliti juga memahami sumber data maupun kancah penelitian dengan *verstehen*. Dalam perspektif fenomenologis, *versthen* sangat diperlukan peneliti didalam kancah penelitian. *Verstehen* adalah cara memahami situasi yang ditemui dilapangan (Nugrahani, 2014) Sehingga pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan

No	Jabatan
1	Ketua KPU Lampung Selatan
2	Camat Sragi
3	Masyarakat Kecamatan Sragi

Sumber : Diolah oleh peneliti, (2024)

Adapun alasan pemilihan informan diatas ialah untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Informan tersebut sangat berkompeten untuk bisa menjawab berbagai persoalan yang terdapat pada penelitian ini, dan juga sudah sesuai dengan bidang-bidang yang dapat membantu memberikan berbagai informasi mengenai penelitian ini nantinya

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil penelitian yang diperoleh melalui dua sumber data (Mekarisce, 2020)

1. Data Primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang ditentukan. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan melalui wawancara langsung dengan informan yang ditentukan dari keterkaitan informan tersebut dengan masalah penelitian. Wawancara juga dilakukan melalui panduan wawancara. Jadi data yang diperoleh secara langsung. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan beberapa informan. Saat menetapkan informan, penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni dengan pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu dalam penelitian.

2. Data Sekunder Data sekunder merupakan data yang melengkapi informasi yang didapat dari sumber data primer berupa artikel-artikel yang didapat dari pihak lain atau melalui perantara seperti surat kabar, majalah, *website*, dan sebagainya.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Bachtiar, 2010). Mc Milan dan Schumacher mengemukakan beberapa instrumen untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif antara lain observasi partisipasan, observasi bidang/lapangan, wawancara mendalam, dokumen, dan artefak teknik tambahan seperti audio visual. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi (Suharsaputra 2014) sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Bachtiar, 2010). Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan data pada penelitian ini karena dengan melakukan wawancara dapat berinteraksi langsung dengan dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Barakso, Sabet dan Schaffner (2014:193) mendefinisikan wawancara adalah Terkait penelitian ini, wawancara yang akan dilakukan meliputi wawancara semi terstruktur (*semistructure interview*) yakni pelaksanaannya lebih bebas dan tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat, dan ide-idenya. Wawancara mendalam merupakan suatu interaksi atau pembicaraan yang terjadi antara satu orang pewawancara dengan satu orang informan (Bachtiar, 2010)

2. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data untuk tujuan penelitian ilmiah dengan mengamati penelitian sendiri maupun orang lain. Observasi atau pengamatan juga dapat didefinisikan sebagai perhatian

yang terfokus terhadap kejadian, gejala atau sesuatu dengan maksud untuk menafsirkannya, mengungkapkan faktor-faktor penyebab dan menemukan kaidah – kaidah yang mengaturnya.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan dengan penelitian. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sudaryono, 2017:219). Alasan penelitian ini menggunakan dokumentasi dalam pengumpulan data sebagai bukti yang riil bahwa telah melakukan penelitian ke lokasi penelitian dengan melakukan wawancara yang telah dibuat dan observasi sehingga mendapatkan data atau jawaban yang diharapkan dari penelitian yang telah dilakukan. Dokumentasi juga dapat berupa fenomena yang diabadikan dalam waktu yang lama.

## 3.6 Teknik Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dari lapangan selanjutnya dilakukan pengolahan data. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

### 1. Editing Data

Tujuan dalam proses editing data adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada didalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sejauh mungkin (Achmadi, 2016: 153). Proses editing merupakan proses dimana peneliti melakukan proses pengecekan atau klarifikasi dari data yang diperoleh, dari hasil pengumpulan data yaitu wawancara observasi dan dokumentasi di lapangan.

### 2. Interpretasi Data

Interpretasi data pada penelitian ini yaitu melakukan pembahasan atau hasil dengan kata lain berarti menjelaskan dan menemukan makna hasil analisis dengan tujuan teoritis dan praktis penelitian (Silalahi, 2012). Penelitian ini akan menjabarkan data yang ada melalui tahap editing kemudian diberikan

penjelasan atau penafsiran serta dilakukan penarikan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

### 3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menyeleksi, menyederhanakan, memfokuskan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional sebagai bahan jawaban terhadap permasalahan penelitian (Fadli, 2021) Analisis data menurut Bogdan & Biklen dalam Moleong & Lexy (2017: 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memusatkan apa yang diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan prosedur reduksi data, *display* (Penyajian data), dan menarik kesimpulan (verifikasi). Proses tersebut dijabarkan (Fadli, 2021) yaitu sebagai berikut :

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, dan memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data dapat memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari jika diperlukan.

2. Penyajian Data (*display data*)

Penyajian data dapat membantu dalam memahami apa yang terjadi di lapangan. Penyajian data adalah mengolah data setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang jelas kedalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema yang sudah dikelompokkan dan dikategorisasikan.

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam rangkaian analisis data kualitatif. Kesimpulan merupakan temuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya tidak jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Proses teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dimulai dari melakukan peninjauan data primer dari hasil wawancara dan dianalisis dengan menggunakan teori strategi untuk menjawab rumusan masalah dan untuk mencapai tujuan penelitian ini.

### **3.8 Teknik Keabsahan Data**

Teknik keabsahan data adalah ketepatan data yang dilaporkan oleh peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti (Soendari, 2012). Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan uji kredibilitas melalui triangulasi. Triangulasi dalam uji kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang peneliti gunakan ialah yang dikembangkan oleh Denzim ada empat triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan yaitu memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik serta teori (Soendari, 2012)

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan yaitu terdapat 4 (empat) faktor-faktor yang menjadi penyebab perilaku Non Voting Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kecamatan Sragi Lampung Selatan antara lain : (1) Faktor Teknis ,(2) Faktor Teknis Politis, (3) Faktor Politis, (4) Faktor Ideologis. Faktor Teknis adalah salah satu faktor yang mendominasi terjadinya Perilaku Non Voting pada Pemilihan Umum 2024 Di Kecamatan Sragi dimana Pekerjaan menjadi salah satu hambatan masyarakat untuk tidak menggunakan hak suaranya. Selain itu faktor ideologis menjadi faktor yang paling banyak menyebabkan terjadinya perilaku non voting pada pemilihan ketidakpercayaan mereka terhadap proses demokrasi yang terjadi di Indonesia menjadikan mereka apatis terhadap proses demokrasi yang terjadi. Dilihat dari sisi politis ketidak tahuan mereka terhadap calon calon membuat mereka tidak memberikan hak suara mereka sebagai warga negara dan yang terakhir faktor teknis politis menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tidak maksimalnya proses demokrasi yang berjalan.

### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka terdapat beberapa saran yaitu:

1. Untuk mengurangi masalah teknis dan teknis politis sebaiknya KPU terus melakukan sosialisasi pendidikan politik agar masyarakat dapat peka terhadap demokrasi yang terjadi dan juga dapat meningkatkan partisipasi politik.
2. Pemerintah Daerah dan DPRD terus meningkatkan pelayanan public agar terciptanya kepuasan terhadap masyarakat

3. Partai politik semakin selektif dalam melaksanakan rekrutment politik saat mengusung calon-calon kepala daerah sehingga menghasilkan calon-cal yang dipercaya oleh masyarakat.
4. Memaksimalkan kinerja KPU sebagai badan penyelenggara demokrasi agar tidak ada kesalahan kesalahan yang menyebabkan tidak optimal nya proses demokrasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Armadawati, C. F. (2022). Pengaruh Trust In Institutions Terhadap Partisipasi Politik Pada Pemilih Pemula. *Buletin Riset Psikologi Dan Kesehatan Mental (BRPKM)*, 2(1). <https://doi.org/10.20473/Brpkm.V2i1.31936>
- Fitriyah, F. (2020). Partai Politik, Rekrutmen Politik Dan Pembentukan Dinasti Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1). <https://doi.org/10.14710/Politika.11.1.2020.1-17>
- Lestari, K. A. P. (2021). Semakin Meningkatnya Presentase Golput Khususnya Dikala Pandemi, Hak Golput Bagi Rakyat Menurut Perspektif Hukum Dan HAM. *Ganesha Civic Education Journal*, 3(1).
- Rinjani, R. (2014). Studi Tentang Golongan Putih (Golput) Dalam Pilkada Gubernur Kaltim 2013 Di Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 2(4). 16(1). <https://doi.org/10.14203/Jpp.V16i1.77>
- Sorik, S. (2019). Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi. *Jurnal Penelitian Politik*,
- Budiardjo, Miriam. 2008. Edisi Revisi. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mujani, Saiful. William R. Liddle, dan Kuskridho Ambardi. 2012. *Kuasa Rakyat: Analisis Tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Mizan Publika.
- Pamungkas, Sigit. 2010. *Pemilu, Perilaku Pemilih, & Kepartaian*. Yogyakarta: Institute For Democracy and Welfarism.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia.

### **Penelitian Sebelumnya**

Darmawan Purba / 2017, Perilaku non voting dalam pemilihan kepala daerah Lampung Timur tahun 2015 (studi di kecamatan way jepara kabupaten lampung timur)

Mulyadi M / 2015, *Analisis kecenderungan dan penyebab perilaku non voting masyarakat kota solok,*

Ardi Yanto / 2017, *Analisis penggunaan hak pilih masyarakat pada pemilihan kepala daerah di kabupaten pringsewu tahun 2017*

Cc purba, a adlin / 2017, Hubungan Faktor Sosiologis Dan Faktor Psikologis Terhadap Prilaku Memilih Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah Pelelawan Tahun 2015

Darwin Tarigan / 2018, Prilaku Tidak Memilih Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015